



Pemerintah
Kabupaten Mempawah



TAHUN 2025 - 2029

Renstr

RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN MEMPAWAH



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang mencakup periode lima tahun. Renstra ini disusun sebagai bentuk operasionalisasi visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, yang berisi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029, dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah. Dokumen ini akan memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat tersebut. Proses penyusunannya dilakukan secara terkoordinasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait guna menjamin keterpaduan dan sinergi antar-perangkat daerah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini. Besar harapan kami, dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi alat pengendalian dan evaluasi atas kinerja pelayanan, serta mendorong tercapainya pelayanan publik yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah.

Mempawah, Agustus 2025
Sekretaris Daerah,



Drs. Ismail, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660508 199203 1 018



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL.....	IV
DAFTAR GAMBAR	V
BAB I PENDAHULUAN.....	V
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah....	8
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	43
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	47
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD.....	48
2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab PD	49
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	51
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	51
2.2.2 Isu Strategis	54
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	59
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah....	59
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	64
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	72
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah.....	72
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	105
BAB V PENUTUP.....	107
5.1 Kesimpulan	107
5.2 Kaidah Pelaksanaan	107
5.3 Pengendalian dan Evaluasi	108



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah23

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah26

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah...29

Tabel 2.4 Kelompok Sasaran Layanan43

Tabel 2.5 Mitra Perangkat Daerah47

Tabel 2.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah49

Tabel 2.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah50

Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....51

Tabel 2.9 Perumusan Isu Perangkat Daerah.....57

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah61

Tabel 3.2 Penentuan Strategi Sekretariat Daerah64

Tabel 3.3 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah66

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Sekretariat Daerah71

Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....73

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah..82

Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah98

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 105

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah 106



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Mempawah...20

Gambar 3.1 *Logical Framework* Sekretariat Daerah Kabupaten
Mempawah...62

Gambar 3.2 Pohon Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Mempawah...63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menegaskan bahwa Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah untuk periode lima tahun.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan teknis-operasional yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mempawah, serta menjadi instrumen untuk menerjemahkan visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam langkah-langkah pembangunan yang sistematis dan terukur. Dokumen ini juga menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah, sekaligus berfungsi sebagai acuan dalam pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan pada lingkup Sekretariat Daerah.

Lebih jauh, Renstra memiliki fungsi strategis dalam mengarahkan perangkat daerah agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah dilakukan secara sistematis melalui tahapan yang meliputi: persiapan, perumusan rancangan awal, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir, hingga penetapan dokumen Renstra. Seluruh proses

disusun dengan mengacu pada ketentuan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah serta Peraturan Kepala Daerah tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah.

Di samping itu, penyusunan Renstra ini juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain: RPJMD Kabupaten Mempawah, Renstra Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mempawah, serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Mempawah, sehingga menjamin keterpaduan arah kebijakan pembangunan secara vertikal maupun horizontal.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan regulasi sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No.56, Tambahan Lembaran Negara No.1106), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2005 - 2025;
27. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah guna menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah secara sistematis, terarah, terukur, dan akuntabel.

Tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Menjadi acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mempawah serta perwujudan tujuan pembangunan daerah secara terencana dalam periode lima tahun;
2. Memberikan arah yang jelas untuk implementasi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Perangkat Daerah, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan;
3. Memberikan kerangka evaluatif berupa tolok ukur kinerja yang digunakan sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan Perangkat Daerah;

4. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah selama periode perencanaan, sehingga terwujudnya keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat landasan konseptual dan normatif penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjabaran dalam bab ini mencakup:

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi terkait gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang mencakup antara lain:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah;
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah;
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah;
 - 2.1.5 Mitra Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah dalam Pemberian Pelayanan (jika ada);
 - 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah; (jika ada); dan
 - 2.1.7 Kerja Sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah; (jika ada).

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan

2.2.2 Isu Strategis.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah beserta indikator kinerja, strategi, dan arah kebijakan dalam lima tahun ke depan. Rincian subbab pada Bab III adalah sebagai berikut:

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah; dan

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Selain itu, dicantumkan pula indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan perangkat daerah. Adapun rincian subbabnya adalah:

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah; dan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan strategis dari keseluruhan dokumen Renstra, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah. Rincian subbab pada Bab V adalah sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan;

5.2 Kaidah Pelaksanaan; dan

5.3 Pengendalian dan Evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah

Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah.

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu Pimpinan Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Perbup Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah, susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah terdiri dari :

- A. Sekretaris Daerah;
- B. Asisten Tata Praja, mengkoordinir :

- 1) Bagian Pemerintahan;
 - 2) Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 3) Bagian Hukum;
- C. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra, mengkoordinir :
- 1) Bagian Perekonomian;
 - 2) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 3) Bagian Kesra dan Mental Spiritual;
- D. Asisten Administrasi dan Umum, mengkoordinir :
- 1) Bagian Organisasi;
 - 2) Bagian Umum;
 - 3) Bagian Humas dan Protokol.
- E. Kelompok Jabatan Fungsional
- F. Staf Ahli Bupati terdiri dari :
- a) Staf Ahli bidang Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik
 - b) Staf Ahli bidang Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
 - c) Staf Ahli bidang Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, membina, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Sekretariat Daerah dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil Negara;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- f. Perumusan rencana kerja Sekretariat Daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Perumusan kebijakan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pembinaan administrasi dan pengelolaan sumber daya aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pengendalian administrasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat daerah;
- l. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Tata Praja

Asisten Tata Praja dipimpin oleh seorang Asisten yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah. Asisten Tata Praja mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Tata Praja mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesatuan bangsa dan politik dan hukum;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, kesatuan bangsa dan politik dan hukum;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesatuan bangsa dan politik dan hukum;

- d. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, kesatuan bangsa dan politik dan hukum;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, kesatuan bangsa dan politik dan hukum.

2.1.1.2.1 Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten. Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.1.2.2 Bagian Hukum

Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten. Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.1.2.3 Bagian Kesbangpol

Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten. Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan

- kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah; dan
 - f. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra

Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra dipimpin oleh seorang Asisten yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta kesra dan mental spiritual.

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan pengadaan barang/jasa serta kesra dan mental spiritual;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan pengadaan barang/jasa serta kesra dan mental spiritual;
- c. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan serta kesra dan mental spiritual;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah di bidang perekonomian, pembangunan dan layanan pengadaan, kesejahteraan rakyat dan mental spiritual yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.1.3.1 Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Perekonomian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten. Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;

- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.1.3.2 Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.1.3.3 Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Mental Spiritual

Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Mental Spiritual dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Mental Spiritual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Mental Spiritual menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten.

2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Administrasi dan Umum

Asisten Administrasi dan Umum dipimpin oleh seorang Asisten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Asisten Administrasi dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan,

penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Administrasi dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan;
- b. Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.1.4.1 Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha dan aparatur, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha tata usaha dan aparatur, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.1.4.2 Bagian Organisasi

Bagian Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten. Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.1.4.3 Bagian Humas Protokol

Bagian Humas dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten. Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati

Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya. Staf Ahli Bupati terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
- b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Tugas Staf Ahli Bupati sesuai bidang adalah:

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Pemerintahan, Hukum dan Politik.
- b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

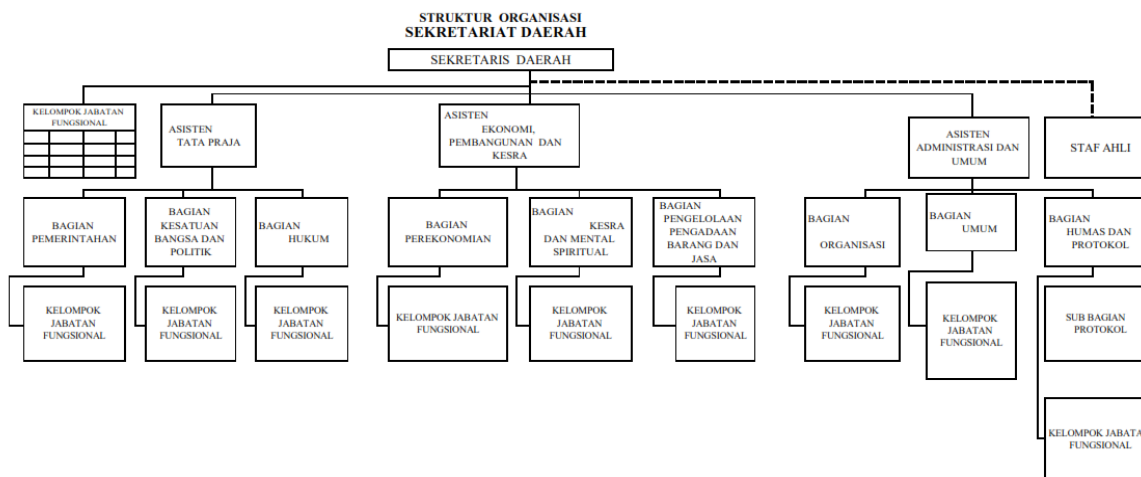
Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah disajikan pada bagan berikut.

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH



Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 30-01-2021
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah

td
ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
BUNJAMIN
NIP. 19760809 2006604 1 009

BUPATI MEMPAWAH

td
ERLINA

2.1.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah

Pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah harus dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien, sehingga memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya berperan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi perangkat daerah, yang mencakup sumber daya manusia dan asset/sarana prasarana. Dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta adanya berbagai regulasi dari pemerintah, maka diperlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah menuntut dukungan sumber daya manusia yang memadai, kompeten, profesional dan berintegritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Saat ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah memiliki 90 pegawai. Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan jenjang jabatan struktural dan fungsional adalah sebagai berikut:

1. Eselon II : 7 Orang
2. Eselon III : 3 Orang
3. Eselon IV : 1 Orang
4. Pejabat fungsional : 23 Orang
5. Pejabat Pelaksana : 56 Orang

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah berada dalam kondisi belum ideal. Sehingga, ke depannya diperlukan langkah-langkah penguatan melalui pengisian jabatan kosong, penataan ulang struktur jabatan, serta peningkatan kapasitas ASN guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara optimal.

Selain aspek jabatan, kondisi pegawai juga dapat dilihat dari tingkat kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Tingkat pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas individual pegawai

dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin kompleks dan berbasis pengetahuan. Jumlah pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah sebanyak 90 orang dapat dirincikan berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut:

1. Magister S2 : 16 Orang
2. Sarjana S1 : 45 Orang
3. Diploma 3 : 7 Orang
4. SMA Sederajat : 22 Orang

Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang S1, yang mencerminkan kesiapan dalam memenuhi tuntutan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Hal ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi peningkatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, serta pengembangan karier berbasis kualifikasi dan kebutuhan organisasi.

Selanjutnya, distribusi usia pegawai juga menjadi aspek penting dalam analisis pengembangan sumber daya manusia. Komposisi usia memberikan gambaran mengenai keberlanjutan dan regenerasi aparatur, serta menjadi dasar dalam merancang strategi pengembangan SDM, seperti kaderisasi, alih pengetahuan, dan perencanaan kebutuhan pegawai di masa mendatang. Jumlah pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah dapat dirincikan berdasarkan kelompok usia sebagai berikut:

1. Usia < 30 tahun : 8 Orang
2. Usia 30–39 tahun : 17 Orang
3. Usia 40–49 tahun : 41 Orang
4. Usia ≥ 50 tahun : 24 Orang

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kelompok usia 40-49 tahun mendominasi komposisi pegawai saat ini. Hal ini mengindikasikan kebutuhan regenerasi pegawai serta menuntut perhatian dalam perencanaan pensiun dan penggantiannya. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis SDM yang mempertimbangkan aspek demografi agar kesinambungan pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan dapat terjaga secara berkelanjutan.



2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah sebagai sarana pendukung pelaksanaan fungsi organisasi dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Jumlah Sarana Prasarana Sekretariat Daerah

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
1	Kendaraan Roda 4 (Empat)	37	-	37
2	Kendaraan Roda 2 (Dua)	9	-	9
3	Stationary Generating Set	8	-	8
4	Pompa Air	25	-	25
5	Mesin Ketik	-	2	2
6	Mesin Fotocopy	1	-	1
7	Lemari Besi/Metal	8	-	8
8	Lemari Kayu	42	-	42
9	Rak Besi	12	-	12
10	Rak Kayu	1	-	1
11	Filing Cabinet Besi	30	-	30
12	Brandkas	5	-	5
13	Lemari Kaca	21	-	21
14	Lemari Makan	2	-	2
15	CCTV	1	-	1
16	Running Text	1	-	1
17	Alat Penghancur Kertas	1	-	1
18	Layar Proyektor	1	-	1
19	Papan Pengumuman	2	-	2
20	Meja Kerja	49	-	49
21	Meja Konsul	1	-	1
22	Kursi Tunggu	28	-	28
23	Bingkai Foto/Figura	6	-	6
24	Lampu Hias	9	-	9
25	Vertical Blind	1	-	1
26	Meja Hias	8	-	8



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
27	Gordyn	1	-	1
28	Sekat Ruangan	1	-	1
29	Kursi Besi/Metal	185	-	185
30	Kursi Kayu	6	-	6
31	Meja Rapat	102	-	102
32	Tempat Tidur Susun	70	-	70
33	Tempat Tidur Kayu	24	-	24
34	Meja Podium	1	-	1
35	Meja Resepsionis	3	-	3
36	Meja Tambahan	7	-	7
37	Meja Panjang	7	-	7
38	Meja Bulat	16	-	16
39	Meja Belajar	107	-	107
40	Meja 1/2 Biro	71	-	71
41	Kasur/Spring Bed	54	-	54
42	Meja Makan Besi	14	-	14
43	Meja Makan Kayu	1	-	1
44	Kursi Rapat	366	-	366
45	Kursi Tamu	71	-	71
46	Kursi Putar	17	-	17
47	Sofa	16	-	16
48	Lemari Buku	9	-	9
49	Buffet	2	-	2
50	Meja 1 Biro	13	-	13
51	Meja Rias	8	-	8
52	Vacuum Cleaner	3	-	3
53	Mesin Rumput	2	-	2
54	Mesin Cuci	4	-	4
55	Lemari Es	17	-	17
56	A.C. Standing	53	-	53
57	A.C. Split	219	-	219
58	Kipas Angin	43	-	43



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
59	Exhaust Fan	21	-	21
60	Cold Storage	3	-	3
61	Water Heater	8	-	8

Sumber: Pengurus BMD Sekretariat Daerah per 30 Juni 2025

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa sebagian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah berada dalam kondisi tidak layak guna, baik karena kerusakan fisik, usia pakai yang telah melampaui batas optimal, maupun ketidaksesuaian dengan kebutuhan operasional saat ini. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas pelayanan dan kinerja organisasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pemeliharaan aset yang masih layak, penghapusan aset tidak layak, serta pengadaan sarana baru secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal dalam lima tahun mendatang.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah telah menetapkan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat serta Bidang-bidang terkait, dengan dukungan pendanaan melalui program dan kegiatan yang tersedia. Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah**

No	Indikator	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Indeks Kepuasan Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah	80	80	80	95	100	80	80,82	79,41	86,10	87,55	100%	100%	99,26%	90,63 %	87,5 %
2	Persentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan ketentuan pembentukan produk hukum daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	4	4	4	4	4	3	3,47	3,47	2,64	2,64	75%	86,75 %	86,75%	66%	66%
4	Nilai AKIP Kabupaten Mempawah Komponen Pelaporan	-	-	-	11	11	-	-	-	10,37	10,30	-	-	-	94,27 %	93,64 %

5	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
6	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	166	135	89	129	2994	2673	2197	3561	4081	3396	6.21%	6.14%	2.5%	3.161 %	88,16 %
7	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	252.791 .683.56 1	178.71 8.759. 435	727.69 5.732. 019	653.45 4.144. 281	689.52 4.865. 085	483.830 .921.56 1	484.63 0.672.8 38	1.183 .399. 119.5 14	1.192. 218.30 0.256	1.169. 474.25 8.382	52.25 %	36.88 %	61.49%	54.81 %	58.96 %

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah, jika dilihat dari hasil capaian pada Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah, Persentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan ketentuan pembentukan produk hukum daerah, Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Nilai AKIP Kabupaten Mempawah Komponen Pelaporan selama 5 tahun masa Renstra menunjukkan hasil yang berfluktuatif naik dan turun. Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah secara umum telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari persentase keberhasilan dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai. Namun demikian, pencapaian sasaran ini masih dirasa belum optimal yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten Mempawah selalu melakukan upaya untuk menghadapi segala hambatan dan kendala agar pencapaian sasaran yang telah ditargetkan dapat dipenuhi dengan baik.

Evaluasi capaian anggaran perangkat daerah disusun untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Melalui analisis terhadap realisasi anggaran dan output yang dihasilkan, evaluasi ini memberikan gambaran kinerja perangkat daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan perencanaan program yang lebih tepat sasaran di periode berikutnya.

Selanjutnya, analisis capaian kinerja perlu dikaitkan dengan tingkat realisasi anggaran sebagai salah satu indikator efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi anggaran selama periode tahun 2020–2024 mencerminkan sejauh mana alokasi sumber daya (*input*) telah dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan luaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan target kinerja. Adapun rincian realisasi anggaran dapat disajikan sebagai berikut:



**Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah**

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
SEKRETARIAT DAERAH	35.430.221.844	36.641.164.242	51.142.773.193	65.950.321.115	74.597.213.735	28.456.362.370	32.714.022.907	46.241.282.474	61.587.424.805	72.188.195.223	80,32%	89,28%	90,42%	93,38%	96,77%
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	959.999.300	-	-	-	-	959.804.400	-	-	-	-	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15.999.300	-	-	-	-	15.949.300	-	-	-	-	99,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pembinaan sekolah sehat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Fasilitasi manajemen kedokteran	944.000.000	-	-	-	-	943.855.100	-	-	-	-	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program pengembangan wawasan kebangsaan	651.689.660	-	-	-	-	282.174.500	-	-	-	-	43,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	26.544.810	-	-	-	-	26.234.400	-	-	-	-	98,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Operasional peningkatan Fungsi Kesbang Linmas	11.578.400	-	-	-	-	11.531.400	-	-	-	-	99,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Fasilitasi Peningkatan Rasa Kebangsaan	533.842.900	-	-	-	-	172.336.300	-	-	-	-	32,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Inventarisasi organisasi politik, profesi dan kemasyarakatan	6.694.875	-	-	-	-	6.477.000	-	-	-	-	96,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Fasilitasi pembentukan tim verifikasi permohonan bantuan parpol	3.986.800	-	-	-	-	3.984.000	-	-	-	-	99,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Fasilitasi tim terpadu penanganan gangguan keamanan daerah	19.062.975	-	-	-	-	18.605.600	-	-	-	-	97,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat	49.978.900	-	-	-	-	43.005.800	-	-	-	-	86,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.949.668.200	-	-	-	-	1.902.375.036	-	-	-	-	97,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pengolahan dan Updating Data Media Informasi	973.676.500	-	-	-	-	971.170.500	-	-	-	-	99,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Dukungan Unit Layanan Pengadaan	87.007.900	-	-	-	-	86.803.936	-	-	-	-	99,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Layanan pengadaan secara elektronik	32.451.400	-	-	-	-	17.951.400	-	-	-	-	55,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Peningkatan Standarisasi Layanan Pengadaan	16.603.800	-	-	-	-	16.523.800	-	-	-	-	99,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	373.066.300	-	-	-	-	349.264.000	-	-	-	-	93,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	466.862.300	-	-	-	-	460.661.400	-	-	-	-	98,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Dukungan pameran informasi pelayanan publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	3.975.000	-	-	-	-	3.975.000	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pengembangan Ekonomi Kreatif	3.975.000	-	-	-	-	3.975.000	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	32.500.000	-	-	-	-	32.500.000	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	32.500.000	-	-	-	-	32.500.000	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	13.821.100	-	-	-	-	11.401.100	-	-	-	-	82,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pengelolaan sistem monitoring dan evaluasi LPSE	13.821.100	-	-	-	-	11.401.100	-	-	-	-	82,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	7.244.600	-	-	-	-	6.589.600	-	-	-	-	90,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pengelolaan perpustakaan Setda	7.244.600	-	-	-	-	6.589.600	-	-	-	-	90,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	24.995.200	-	-	-	-	24.340.500	-	-	-	-	97,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	24.995.200	-	-	-	-	24.340.500	-	-	-	-	97,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	13.238.900	-	-	-	-	13.103.900	-	-	-	-	98,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pembinaan dan pengawasan distribusi raskin	13.238.900	-	-	-	-	13.103.900	-	-	-	-	98,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Non Program	11.335.085.834	-	-	-	-	9.813.243.607	-	-	-	-	86,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Non Kegiatan	11.335.085.834	-	-	-	-	9.813.243.607	-	-	-	-	86,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.341.221.400	-	-	-	-	5.958.987.396	-	-	-	-	93,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.392.000.000	-	-	-	-	1.174.720.978	-	-	-	-	84,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	100.000.000	-	-	-	-	62.190.940	-	-	-	-	62,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	65.000.000	-	-	-	-	36.189.300	-	-	-	-	55,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Penyediaan jasa kebersihan kantor	350.000.000	-	-	-	-	350.000.000	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Penyediaan alat tulis kantor	56.625.000	-	-	-	-	56.154.900	-	-	-	-	99,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	89.996.400	-	-	-	-	89.992.350	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	265.000.000	-	-	-	-	236.079.850	-	-	-	-	89,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000	-	-	-	-	14.800.000	-	-	-	-	98,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Penyediaan makanan dan minuman	2.590.000.000	-	-	-	-	2.589.300.000	-	-	-	-	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	255.000.000	-	-	-	-	248.159.078	-	-	-	-	97,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	100.000.000	-	-	-	-	87.400.000	-	-	-	-	87,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Penyediaan jasa pendukung keamanan dan ketertiban / pengamanan kantor	237.600.000	-	-	-	-	189.000.000	-	-	-	-	79,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Penyediaan jasa kebersihan rumah jabatan	568.000.000	-	-	-	-	568.000.000	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Penyediaan Jasa kebersihan gedung umum	113.000.000	-	-	-	-	113.000.000	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Penyediaan Jasa Supir	144.000.000	-	-	-	-	144.000.000	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5.602.263.250	-	-	-	-	3.536.126.719	-	-	-	-	63,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pengadaan mobil jabatan	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	853.248.250	-	-	-	-	802.522.375	-	-	-	-	94,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	473.055.000	-	-	-	-	473.055.000	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pengadaan komputer	93.000.000	-	-	-	-	93.000.000	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pengadaan alat studio dan telekomunikasi	113.300.000	-	-	-	-	113.300.000	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	385.000.000	-	-	-	-	383.469.894	-	-	-	-	99,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	275.000.000	-	-	-	-	268.035.000	-	-	-	-	97,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	656.000.000	-	-	-	-	654.207.850	-	-	-	-	99,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	330.000.000	-	-	-	-	329.904.700	-	-	-	-	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	55.000.000	-	-	-	-	51.293.900	-	-	-	-	93,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	73.660.000	-	-	-	-	73.131.000	-	-	-	-	99,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	35.000.000	-	-	-	-	34.980.000	-	-	-	-	99,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pemeliharaan rutin/berkala komputer	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi	30.000.000	-	-	-	-	29.980.000	-	-	-	-	99,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Umum	130.000.000	-	-	-	-	129.747.000	-	-	-	-	99,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung umum	55.000.000	-	-	-	-	54.500.000	-	-	-	-	99,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program peningkatan disiplin aparatur	198.129.800	-	-	-	-	161.744.000	-	-	-	-	81,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	198.129.800	-	-	-	-	161.744.000	-	-	-	-	81,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	62.433.400	-	-	-	-	60.946.625	-	-	-	-	97,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14.982.800	-	-	-	-	14.634.200	-	-	-	-	97,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Penyusunan laporan keuangan semesteran	9.975.300	-	-	-	-	9.843.925	-	-	-	-	98,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	22.475.600	-	-	-	-	21.475.600	-	-	-	-	95,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	14.999.700	-	-	-	-	14.992.900	-	-	-	-	99,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	2.121.798.975	-	-	-	-	1.463.509.345	-	-	-	-	68,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	1.459.578.500	-	-	-	-	944.619.250	-	-	-	-	64,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pelayanan keprotokolan dan rumah tangga Kesekretariatan	189.875.200	-	-	-	-	170.714.840	-	-	-	-	89,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Fasilitasi dan koordinasi perumusan kebijakan daerah	228.045.275	-	-	-	-	135.602.691	-	-	-	-	59,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Fasilitasi Penataan Tata Usaha Pimpinan Daerah / Pejabat Negara	244.300.000	-	-	-	-	212.572.564	-	-	-	-	87,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Mengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Survey indeks kepuasan masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	180.540.200	-	-	-	-	59.028.940	-	-	-	-	32,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Fasilitasi kerjasama di bidang pemerintahan	180.540.200	-	-	-	-	59.028.940	-	-	-	-	32,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	562.820.775	-	-	-	-	510.252.275	-	-	-	-	90,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	76.996.600	-	-	-	-	72.791.600	-	-	-	-	94,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Publikasi peraturan perundang-undangan	50.248.400	-	-	-	-	49.985.900	-	-	-	-	99,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	90.302.400	-	-	-	-	87.077.700	-	-	-	-	96,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pengelolaan dan penataan dokumentasi hukum	28.679.850	-	-	-	-	28.612.550	-	-	-	-	99,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Penyuluhan hukum dan sosialisasi perundang-undangan	170.200.000	-	-	-	-	134.159.900	-	-	-	-	78,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Kerjasama Penyusunan Naskah Akademik	74.986.800	-	-	-	-	74.436.800	-	-	-	-	99,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum (JDIH)	71.406.725	-	-	-	-	63.187.825	-	-	-	-	88,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Program Penataan Daerah Otonom	33.066.500	-	-	-	-	32.401.000	-	-	-	-	97,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Penataan Batas Daerah	17.164.500	-	-	-	-	17.109.000	-	-	-	-	99,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Identifikasi dan Penamaan Rupa Bumi kabupaten Mempawah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Penataan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	15.902.000	-	-	-	-	15.292.000	-	-	-	-	96,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Penataan Kecamatan / Kelurahan	39.520.800	-	-	-	-	35.065.000	-	-	-	-	88,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Penataan Batas Wilayah Adminitrasi Kecamatan	31.147.300	-	-	-	-	26.747.000	-	-	-	-	85,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Fasilitasi Penyusunan Profil Kecamatan	8.373.500	-	-	-	-	8.318.000	-	-	-	-	99,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Perumusan Kebijakan Bidang Ekonomi	113.136.450	-	-	-	-	112.278.650	-	-	-	-	99,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Fasilitasi Pembinaan Perusahaan Daerah	80.814.350	-	-	-	-	80.408.450	-	-	-	-	99,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Ekonomi	12.613.900	-	-	-	-	12.538.900	-	-	-	-	99,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Fasilitasi perumusan Kebijakan sektor industri, perdagangan dan Investasi	19.708.200	-	-	-	-	19.331.300	-	-	-	-	98,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Fasilitasi dan koordinasi pengawasan, pengendalian perekonomian daerah (TPID)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Pembinaan Kelembagaan Sosial Keagamaan	4.612.376.350	-	-	-	-	2.983.905.900	-	-	-	-	64,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Fasilitasi kegiatan keagamaan	2.003.597.900	-	-	-	-	500.099.300	-	-	-	-	24,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Fasilitasi penyelenggaraan aktivitas ramadhan	310.000.000	-	-	-	-	254.000.000	-	-	-	-	81,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Fasilitasi pengembangan keagamaan	798.387.800	-	-	-	-	791.487.800	-	-	-	-	99,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji	80.000.000	-	-	-	-	80.000.000	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Fasilitasi Pengembangan Manajemen LPTQ	1.338.520.450	-	-	-	-	1.276.798.600	-	-	-	-	95,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Tingkat Pembinaan Kebijakan Kesejahteraan Sosial	81.870.200	-	-	-	-	81.520.200	-	-	-	-	99,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	162.648.400	-	-	-	-	119.188.194	-	-	-	-	73,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Penyusunan formasi PNS	29.341.800	-	-	-	-	23.017.400	-	-	-	-	78,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Penguatan kebijakan bidang organisasi tingkat regional dan nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	28.207.600	-	-	-	-	13.135.100	-	-	-	-	46,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Fasilitasi dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Publik	40.239.000	-	-	-	-	37.130.700	-	-	-	-	92,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Fasilitasi Penyusunan Evaluasi Jabatan	11.876.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Sosialisasi peraturan bupati dibidang ketatalaksanaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	4.500.000	-	-	-	-	4.500.000	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Fasilitasi, Evaluasi dan Pelaporan Implementasi Standar Pelayanan Minimal	6.922.000	-	-	-	-	6.922.000	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pembinaan Bagi Para Pelaku Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	41.562.000	-	-	-	-	34.482.994	-	-	-	-	82,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Penegakan Hukum	213.812.200	-	-	-	-	195.547.500	-	-	-	-	91,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pemberian bantuan hukum	79.308.000	-	-	-	-	73.546.400	-	-	-	-	92,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Kerjasama Advokasi bagi PNS dan Pejabat Negara	61.900.100	-	-	-	-	60.774.400	-	-	-	-	98,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



- Diseminasi dan Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM)	28.844.000	-	-	-	-	28.818.300	-	-	-	-	99,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)	43.760.100	-	-	-	-	32.408.400	-	-	-	-	74,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Kerjasama Pembangunan	8.099.500	-	-	-	-	7.377.400	-	-	-	-	91,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Fasilitas Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PSP)	8.099.500	-	-	-	-	7.377.400	-	-	-	-	91,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program perencanaan pembangunan daerah	166.137.900	-	-	-	-	150.552.133	-	-	-	-	90,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	68.986.500	-	-	-	-	62.545.233	-	-	-	-	90,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Kordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)	26.557.000	-	-	-	-	26.328.000	-	-	-	-	99,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	30.422.000	-	-	-	-	30.227.400	-	-	-	-	99,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Koordinasi Penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	29.283.000	-	-	-	-	24.014.000	-	-	-	-	82,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Koordinasi Penyusunan Perencanaan Kinerja	10.889.400	-	-	-	-	7.437.500	-	-	-	-	68,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	19.998.150	-	-	-	-	19.943.650	-	-	-	-	99,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	19.998.150	-	-	-	-	19.943.650	-	-	-	-	99,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	29.999.750	-	-	-	-	29.097.350	-	-	-	0,00%	96,99%	0,00%	0,00%	0,00%
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	4.999.900	-	-	-	-	4.999.900	-	-	-	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	3.499.950	-	-	-	-	3.499.950	-	-	-	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1.499.975	-	-	-	-	1.499.900	-	-	-	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	3.500.000	-	-	-	-	3.499.950	-	-	-	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	1.500.000	-	-	-	-	1.499.900	-	-	-	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	14.999.925	-	-	-	-	14.097.750	-	-	-	0,00%	93,99%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	11.569.348.059	-	-	-	-	11.176.622.995	-	-	-	0,00%	96,61%	0,00%	0,00%	0,00%
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	11.509.348.484	-	-	-	-	11.117.173.495	-	-	-	0,00%	96,59%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	25.000.000	-	-	-	-	24.950.000	-	-	-	0,00%	99,80%	0,00%	0,00%	0,00%
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	27.499.800	-	-	-	-	26.999.725	-	-	-	0,00%	98,18%	0,00%	0,00%	0,00%
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	7.499.775	-	-	-	-	7.499.775	-	-	-	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	50.000.000	-	-	-	-	32.990.798	-	-	-	0,00%	65,98%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	50.000.000	-	-	-	-	32.990.798	-	-	-	0,00%	65,98%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.030.005.000	-	-	-	-	3.016.321.700	-	-	-	0,00%	99,55%	0,00%	0,00%	0,00%
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	135.000.000	-	-	-	-	134.996.800	-	-	-	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Knrtor	-	91.625.000	-	-	-	-	88.008.500	-	-	-	0,00%	96,05%	0,00%	0,00%	0,00%
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	2.390.000.000	-	-	-	-	2.388.800.000	-	-	-	0,00%	99,95%	0,00%	0,00%	0,00%



Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	100.000.000	-	-	-	-	99.654.700	-	-	-	0,00%	99,65%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	15.000.000	-	-	-	-	14.900.000	-	-	-	0,00%	99,33%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	298.380.000	-	-	-	-	289.961.700	-	-	-	0,00%	97,18%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	378.286.200	-	-	-	-	377.971.000	-	-	-	0,00%	99,92%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaan Mebel	-	80.000.000	-	-	-	-	79.874.600	-	-	-	0,00%	99,84%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	150.000.000	-	-	-	-	149.895.800	-	-	-	0,00%	99,93%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	148.286.200	-	-	-	-	148.200.600	-	-	-	0,00%	99,94%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.274.000.000	-	-	-	-	2.074.092.197	-	-	-	0,00%	91,21%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	1.364.000.000	-	-	-	-	1.186.143.497	-	-	-	0,00%	86,96%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	910.000.000	-	-	-	-	887.948.700	-	-	-	0,00%	97,58%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.373.501.200	-	-	-	-	2.236.553.850	-	-	-	0,00%	94,23%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	526.026.200	-	-	-	-	525.737.450	-	-	-	0,00%	99,95%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	394.815.000	-	-	-	-	394.471.550	-	-	-	0,00%	99,91%	0,00%	0,00%	0,00%
Pemeliharaan Mebel	-	15.000.000	-	-	-	-	14.452.000	-	-	-	0,00%	96,35%	0,00%	0,00%	0,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	839.000.000	-	-	-	-	825.378.100	-	-	-	0,00%	98,38%	0,00%	0,00%	0,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	305.000.000	-	-	-	-	194.559.750	-	-	-	0,00%	63,79%	0,00%	0,00%	0,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	293.660.000	-	-	-	-	281.955.000	-	-	-	0,00%	96,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	778.619.474	-	-	-	-	656.454.376	-	-	-	0,00%	84,31%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	190.339.474	-	-	-	-	168.174.376	-	-	-	0,00%	88,35%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	88.280.000	-	-	-	-	88.280.000	-	-	-	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	400.000.000	-	-	-	-	400.000.000	-	-	-	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Penataan Organisasi	-	318.919.352	-	-	-	-	262.077.775	-	-	-	0,00%	82,18%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	140.910.000	-	-	-	-	112.816.700	-	-	-	0,00%	80,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	98.514.352	-	-	-	-	76.113.325	-	-	-	0,00%	77,26%	0,00%	0,00%	0,00%
Peningkatan Kinerja dan Reformasi dan Birokrasi	-	79.495.000	-	-	-	-	73.147.750	-	-	-	0,00%	92,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	2.315.853.127	-	-	-	-	1.788.569.654	-	-	-	0,00%	77,23%	0,00%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Keprotokolan	-	164.518.752	-	-	-	-	130.316.700	-	-	-	0,00%	79,21%	0,00%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-	2.099.168.575	-	-	-	-	1.609.822.854	-	-	-	0,00%	76,69%	0,00%	0,00%	0,00%
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-	52.165.800	-	-	-	-	48.430.100	-	-	-	0,00%	92,84%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Administrasi Tata Pemerintahan	-	528.631.200	-	-	-	-	194.154.025	-	-	-	0,00%	36,73%	0,00%	0,00%	0,00%
Penataan Administrasi Pemerintahan	-	238.950.000	-	-	-	-	7.399.800	-	-	-	0,00%	3,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengelola Administrasi Kewilayahan	-	147.460.000	-	-	-	-	93.339.900	-	-	-	0,00%	63,30%	0,00%	0,00%	0,00%



Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-	142.221.200	-	-	-	-	93.414.325	-	-	-	0,00%	65,68%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Fasilitas Kerjasama Daerah	-	574.434.800	-	-	-	-	193.836.525	-	-	-	0,00%	33,74%	0,00%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	-	534.772.800	-	-	-	-	181.316.525	-	-	-	0,00%	33,91%	0,00%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	-	19.662.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	-	20.000.000	-	-	-	-	12.520.000	-	-	-	0,00%	62,60%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Fasilitas dan koordinasi hukum	-	640.591.500	-	-	-	-	619.091.957	-	-	-	0,00%	96,64%	0,00%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	-	319.748.100	-	-	-	-	309.998.075	-	-	-	0,00%	96,95%	0,00%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Bantuan Hukum	-	217.002.400	-	-	-	-	205.809.882	-	-	-	0,00%	94,84%	0,00%	0,00%	0,00%
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	-	103.841.000	-	-	-	-	103.284.000	-	-	-	0,00%	99,46%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	8.694.966.500	-	-	-	-	7.417.053.362	-	-	-	0,00%	85,30%	0,00%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-	8.257.211.300	-	-	-	-	7.319.356.173	-	-	-	0,00%	88,64%	0,00%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	-	192.290.200	-	-	-	-	62.817.414	-	-	-	0,00%	32,67%	0,00%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	-	245.465.000	-	-	-	-	34.879.775	-	-	-	0,00%	14,21%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	226.347.200	-	-	-	-	203.864.375	-	-	-	0,00%	90,07%	0,00%	0,00%	0,00%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-	86.347.250	-	-	-	-	82.141.525	-	-	-	0,00%	95,13%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-	83.999.950	-	-	-	-	73.634.850	-	-	-	0,00%	87,66%	0,00%	0,00%	0,00%
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-	56.000.000	-	-	-	-	48.088.000	-	-	-	0,00%	85,87%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	72.739.750	-	-	-	-	39.554.900	-	-	-	0,00%	54,38%	0,00%	0,00%	0,00%
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	-	53.400.000	-	-	-	-	31.028.000	-	-	-	0,00%	58,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-	19.339.750	-	-	-	-	8.526.900	-	-	-	0,00%	44,09%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Pengadaan Barang dan Jasa	-	687.097.230	-	-	-	-	508.250.075	-	-	-	0,00%	73,97%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	384.029.030	-	-	-	-	284.119.700	-	-	-	0,00%	73,98%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengelolaan Layanan Pegadaan Secara Elektronik	-	109.660.000	-	-	-	-	94.621.400	-	-	-	0,00%	86,29%	0,00%	0,00%	0,00%
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	193.408.200	-	-	-	-	129.508.975	-	-	-	0,00%	66,96%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	-	139.999.700	-	-	-	-	102.402.175	-	-	-	0,00%	73,14%	0,00%	0,00%	0,00%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	-	62.999.950	-	-	-	-	56.029.725	-	-	-	0,00%	88,94%	0,00%	0,00%	0,00%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	-	42.000.000	-	-	-	-	30.594.625	-	-	-	0,00%	72,84%	0,00%	0,00%	0,00%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	-	34.999.750	-	-	-	-	15.777.825	-	-	-	0,00%	45,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila	-	579.991.800	-	-	-	-	436.195.850	-	-	-	0,00%	75,21%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyusunan Program Kerja di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	561.924.300	-	-	-	-	430.325.500	-	-	-	0,00%	76,58%	0,00%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	18.067.500	-	-	-	-	5.870.350	-	-	-	0,00%	32,49%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	-	1.197.280.000	-	-	-	-	1.196.646.568	-	-	-	0,00%	99,95%	0,00%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	7.319.500	-	-	-	-	7.228.200	-	-	-	0,00%	98,75%	0,00%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	1.189.960.500	-	-	-	-	1.189.418.368	-	-	-	0,00%	99,95%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	44.665.900	-	-	-	-	34.540.900	-	-	-	0,00%	77,33%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	24.745.900	-	-	-	-	15.645.900	-	-	-	0,00%	63,23%	0,00%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	18.440.000	-	-	-	-	17.415.000	-	-	-	0,00%	94,44%	0,00%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	1.480.000	-	-	-	-	1.480.000	-	-	-	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	82.386.500	-	-	-	-	68.680.500	-	-	-	0,00%	83,36%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	28.650.600	-	-	-	-	19.470.600	-	-	-	0,00%	67,96%	0,00%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	43.735.900	-	-	-	-	39.834.900	-	-	-	0,00%	91,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	10.000.000	-	-	-	-	9.375.000	-	-	-	0,00%	93,75%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	53.500.000	-	-	-	-	49.000.000	-	-	-	0,00%	91,59%	0,00%	0,00%	0,00%



Penyusunan Program Kerja di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	22.800.000	-	-	-	-	22.800.000	-	-	-	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Koordinasi di bidang kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	15.620.000	-	-	-	-	11.470.000	-	-	-	0,00%	73,43%	0,00%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	15.080.000	-	-	-	-	14.730.000	-	-	-	0,00%	97,68%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	29.794.301.638	31.107.646.167	26.845.588.758	-	-	27.298.757.554	28.215.505.773	25.818.652.138	-	-	91,62%	90,70%	96,17%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	4.999.900	9.999.900	9.999.900	-	-	4.696.050	9.362.200	9.692.167,00	-	-	93,92%	93,62%	96,92%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	3.499.950	3.499.950	3.499.600	-	-	3.356.600	3.496.000	3.416.623,00	-	-	95,90%	99,89%	97,63%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	1.499.900	1.499.900	1.499.500	-	-	1.499.800	1.475.985	1.452.150,00	-	-	99,99%	98,41%	96,84%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	3.499.950	3.499.950	3.499.600	-	-	3.356.600	3.498.208	3.417.186,00	-	-	95,90%	99,95%	97,65%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	1.499.900	1.499.900	1.499.500	-	-	1.499.800	1.468.300	1.456.250,00	-	-	99,99%	97,89%	97,12%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	14.999.750	14.999.750	14.999.350	-	-	14.999.750	14.756.425	14.279.320,00	-	-	100,00%	98,38%	95,20%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	11.909.459.449	12.259.128.883	12.918.276.991	-	-	11.637.918.140	12.076.994.755	12.681.476.700,00	-	-	97,72%	98,51%	98,17%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	24.942.575	126.540.000	198.060.000	-	-	24.812.350	125.510.000	134.080.000,00	-	-	99,48%	99,19%	67,70%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	26.999.900	26.999.800	26.999.750	-	-	26.939.600	26.686.750	26.340.605,00	-	-	99,78%	98,84%	97,56%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	-	7.499.600	7.499.600	7.499.450	-	-	7.474.500	7.373.836	7.432.487,00	-	-	99,67%	98,32%	99,11%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	29.159.800	29.159.650	-	-	-	29.155.700	27.713.750,00	-	-	0,00%	99,99%	95,04%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	-	-	112.948.000	-	-	-	-	70.842.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	140.000.000	135.000.000	60.000.000	-	-	134.013.780	93.913.800	59.950.362,00	-	-	95,72%	69,57%	99,92%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	129.999.600	168.161.700	169.997.400	-	-	129.346.200	168.161.700	169.992.800,00	-	-	99,50%	100,00%	100,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	94.997.200	164.997.900	124.997.300	-	-	94.997.200	164.653.476	124.730.000,00	-	-	100,00%	99,79%	99,79%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	2.765.500.000	1.926.630.000	1.665.962.500	-	-	2.748.875.000	1.824.425.661	1.657.629.726,00	-	-	99,40%	94,70%	99,50%
Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	109.999.775	245.050.400	190.050.350	-	-	109.999.550	244.090.074	188.738.868,00	-	-	100,00%	99,61%	99,31%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	14.991.500	14.991.500	14.991.500	-	-	14.960.000	14.991.500	14.991.500,00	-	-	99,79%	100,00%	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	1.485.000.000	750.000.000	860.000.000	-	-	1.239.207.035	718.272.246	836.715.822,00	-	-	83,45%	95,77%	97,29%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	14.220.000	-	-	-	-	14.220.000,00	-	-	0,00%	0,00%	100,00%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	2.000.000.000	-	-	-	-	1.373.900.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	630.580.000	-	-	-	-	600.900.000	-	-	-	0,00%	95,29%	0,00%
Pengadaan Mebel	-	-	93.213.500	124.994.000	87.775.000	-	-	85.213.500	124.796.000	87.350.000,00	-	-	91,42%	99,84%	99,52%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	1.481.531.250	404.334.600	304.861.000	-	-	1.231.163.750	346.289.200	292.818.000,00	-	-	83,10%	85,64%	96,05%



Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	976.412.300	741.787.800	462.418.000	-	-	901.048.396	736.527.000	461.795.000,00	-	-	92,28%	99,29%	99,87%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	1.800.000.000	1.840.200.000	1.705.000.000	-	-	1.289.151.374	1.399.253.291	1.236.241.895,00	-	-	71,62%	76,04%	72,51%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	937.551.712	1.040.621.464	939.821.280	-	-	878.425.316	1.008.896.072	938.217.730,00	-	-	93,69%	96,95%	99,83%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	822.935.200	778.053.400	576.910.700	-	-	767.474.300	777.847.600	576.824.200,00	-	-	93,26%	99,97%	99,99%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	509.789.300	514.825.000	454.777.300	-	-	509.514.450	513.814.100	452.235.350,00	-	-	99,95%	99,80%	99,44%
Pemeliharaan Mebel	-	-	14.960.000	14.960.000	15.000.000	-	-	14.960.000	14.960.000	15.000.000,00	-	-	100,00%	100,00%	100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	1.004.027.100	1.034.418.200	1.341.351.160	-	-	1.004.026.900	1.034.107.498	1.340.601.160,00	-	-	100,00%	99,97%	99,94%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	280.000.000	155.000.000	95.000.000	-	-	133.880.660	154.698.750	94.998.000,00	-	-	47,81%	99,81%	100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	260.060.000	230.899.760	183.360.000	-	-	257.300.000	229.407.500	167.853.000,00	-	-	98,94%	99,35%	91,54%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	190.339.474	260.339.474	59.388.575	-	-	167.443.174	168.174.456	59.388.575,00	-	-	87,97%	64,60%	100,00%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	88.280.000	148.280.000	88.280.000	-	-	88.280.000	142.505.000	41.113.000,00	-	-	100,00%	96,11%	46,57%
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	180.000.000	260.000.000	365.000.000	-	-	73.585.700	257.871.675	360.792.386,00	-	-	40,88%	99,18%	98,85%
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	400.000.000	547.285.716	455.683.000	-	-	400.000.000	400.000.000	445.800.000,00	-	-	100,00%	73,09%	97,83%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	-	-	-	1.418.400.000	838.792.800	-	-	-	837.773.276	838.274.047,00	-	-	0,00%	59,06%	99,94%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	-	-	-	932.000.000	46.600.000	-	-	-	559.123.761	46.593.333,00	-	-	0,00%	59,99%	99,99%
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	-	90.181.850	79.693.000	110.603.700	-	-	80.443.571	73.080.484	102.753.610,00	-	-	89,20%	91,70%	92,90%
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	-	80.390.075	66.869.500	90.369.500	-	-	73.921.900	46.410.665	83.671.497,00	-	-	91,95%	69,40%	92,59%
Peningkatan Kinerja dan Reformasi dan Birokrasi	-	-	75.307.400	165.997.300	289.843.800	-	-	68.545.500	141.805.141	249.743.309,00	-	-	91,02%	85,43%	86,16%
Fasilitasi Keprotokolan	-	-	222.210.300	197.736.900	179.462.900	-	-	210.904.340	185.585.259	178.612.925,00	-	-	94,91%	93,85%	99,53%
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-	-	1.247.024.028	3.458.527.320	1.618.016.946	-	-	1.244.781.226	2.795.759.115	1.572.718.612,00	-	-	99,82%	80,84%	97,20%
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-	-	187.751.200	172.683.800	222.060.756	-	-	175.999.342	137.633.314	197.530.193,00	-	-	93,74%	79,70%	88,95%
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	17.656.000.900	19.847.305.548	23.234.929.471	-	-	15.744.519.396	18.676.122.938	22.237.315.456	-	-	89,17%	94,10%	95,71%
Penataan Administrasi Pemerintahan	-	-	9.307.200	36.565.600	65.251.800	-	-	9.307.200	36.093.300	61.490.150,00	-	-	100,00%	98,71%	94,24%
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-	-	112.625.000	76.297.300	82.386.900	-	-	109.895.000	71.719.000	76.685.848,00	-	-	97,58%	94,00%	93,08%
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-	-	136.781.200	77.496.700	197.923.400	-	-	120.591.900	58.418.330	190.494.760,00	-	-	88,16%	75,38%	96,25%
Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	-	-	310.772.800	250.800.000	180.546.800	-	-	178.212.100	196.969.357	154.724.944,00	-	-	57,34%	78,54%	85,70%
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	-	-	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	-	-	20.000.000	27.000.000	25.835.000	-	-	20.000.000	26.755.355	24.873.000,00	-	-	100,00%	99,09%	96,28%
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	-	-	306.748.100	274.974.200	505.005.800	-	-	299.060.450	265.938.520	324.252.827,00	-	-	97,49%	96,71%	64,21%
Fasilitasi Bantuan Hukum	-	-	209.649.500	271.693.498	513.839.700	-	-	173.279.150	254.508.226	405.714.655,00	-	-	82,65%	93,67%	78,96%
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	-	-	103.841.000	70.784.500	110.467.050	-	-	97.040.500	64.451.850	86.861.214,00	-	-	93,45%	91,05%	78,63%
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-	-	8.436.171.100	11.615.254.950	10.620.440.021	-	-	7.780.025.889,60	10.596.728.225	10.173.457.314,00	-	-	92,22%	91,23%	95,79%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	-	-	200.000.000	6.063.393.000	10.506.653.000	-	-	167.245.256,40	6.025.866.615	10.322.750.494,00	-	-	83,62%	99,38%	98,25%



Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	-	-	7.210.105.000	1.083.045.800	426.580.000	-	-	6.789.861.950,00	1.078.674.160	416.010.250,00	-	-	94,17%	99,60%	97,52%
Program Perekonomian dan Pembangunan	-	-	1.141.049.155	1.039.772.590	939.114.650	-	-	1.026.552.396	880.710.596	793.868.953	-	-	89,97%	84,70%	84,53%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-	-	234.329.925	199.900.000	164.879.800	-	-	233.139.850	196.431.431	129.027.450,00	-	-	99,49%	98,26%	78,26%
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-	-	132.307.700	108.358.800	50.924.900	-	-	109.612.700	94.186.594	44.226.380,00	-	-	82,85%	86,92%	86,85%
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-	-	32.999.750	52.599.000	51.974.400	-	-	21.399.550	39.807.065	48.052.600,00	-	-	64,85%	75,68%	92,45%
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	-	-	39.761.300	22.019.500	44.748.650	-	-	36.066.100	16.867.050	31.552.100,00	-	-	90,71%	76,60%	70,51%
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-	-	69.887.900	28.300.000	19.924.900	-	-	68.282.900	10.319.250	15.206.000,00	-	-	97,70%	36,46%	76,32%
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	196.529.030	237.633.790	270.535.400	-	-	181.516.836	221.516.761	235.347.317,00	-	-	92,36%	93,22%	86,99%
Pengelolaan Layanan Pegadaian Secara Elektronik	-	-	155.166.000	171.912.500	221.071.950	-	-	144.040.166	156.212.545	209.415.327,00	-	-	92,83%	90,87%	94,73%
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	177.848.600	135.309.600	52.329.800	-	-	169.005.544	101.843.075	45.343.699,00	-	-	95,03%	75,27%	86,65%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	-	-	47.679.525	28.517.000	21.891.700	-	-	21.699.500	18.582.705	12.777.180,00	-	-	45,51%	65,16%	58,37%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	-	-	30.844.775	22.122.400	17.383.900	-	-	21.324.750	12.926.815	8.513.900,00	-	-	69,14%	58,43%	48,98%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	-	-	23.694.650	33.100.000	23.449.250	-	-	20.464.500	12.017.305	14.407.000,00	-	-	86,37%	36,31%	61,44%
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	806.222.200	824.198.650	912.664.540	-	-	740.631.460	810.048.875	884.041.305	-	-	91,86%	98,28%	96,86%
Penyusunan Program Kerja di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	30.622.375	13.414.400	4.620.400	-	-	28.336.760	11.534.100	4.612.810,00	-	-	92,54%	85,98%	99,84%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	756.172.325	797.185.000	896.279.640	-	-	698.861.050	784.952.140	869.663.995,00	-	-	92,42%	98,47%	97,03%
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	19.427.500	13.599.250	11.764.500	-	-	13.433.650	13.562.635	9.764.500,00	-	-	69,15%	99,73%	83,00%
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	-	-	1.397.279.900	12.500.376.500	21.977.577.866	-	-	1.196.227.418	12.496.177.428	21.973.526.226	-	-	85,61%	99,97%	99,98%
Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	-	7.319.500	7.319.500	7.319.550	-	-	7.319.250	7.293.860	6.819.550,00	-	-	100,00%	99,65%	93,17%
Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	-	1.389.960.400	12.493.057.000	21.970.258.316	-	-	1.188.908.168	12.488.883.568	21.966.706.676,00	-	-	85,54%	99,97%	99,98%
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	55.360.800	38.752.360	47.600.100	-	-	53.902.600	33.120.900	34.336.695	-	-	97,37%	85,47%	72,14%
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	-	20.374.800	14.262.360	14.504.500	-	-	19.874.700	12.901.400	9.657.470,00	-	-	97,55%	90,46%	66,58%
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	-	11.986.000	8.390.000	10.095.600	-	-	11.027.900	6.125.300	6.799.350,00	-	-	92,01%	73,01%	67,35%

Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	-	23.000.000	16.100.000	23.000.000	-	-	23.000.000	14.094.200	17.879.875,00	-	-	100,00%	87,54%	77,74%
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan budaya	-	-	64.459.300	91.969.300	69.140.700	-	-	57.754.000	84.614.030	55.027.400	-	-	89,60%	92,00%	79,59%
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-	14.223.400	9.953.400	12.333.100	-	-	11.448.300	9.267.955	8.877.600,00	-	-	80,49%	93,11%	71,98%
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-	43.735.900	63.015.900	50.307.800	-	-	43.735.800	62.658.475	41.590.000,00	-	-	100,00%	99,43%	82,67%
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-	6.500.000	19.000.000	6.499.800	-	-	2.569.900	12.687.600	4.559.800,00	-	-	39,54%	66,78%	70,15%
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	-	-	228.099.300	500.300.000	570.597.650	-	-	122.937.650	391.124.265	391.427.050	-	-	53,90%	78,18%	68,60%
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	-	26.331.500	26.331.500	26.331.350	-	-	23.400.000	25.318.670	21.101.350,00	-	-	88,87%	96,15%	80,14%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	-	10.153.000	7.107.100	10.152.700	-	-	7.324.850	6.986.085	9.258.700,00	-	-	72,14%	98,30%	91,19%
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	-	9.802.000	6.861.400	9.801.700	-	-	5.300.000	2.708.140	-	-	-	54,07%	39,47%	0,00%
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	181.812.800	460.000.000	524.311.900	-	-	86.912.800	356.111.370	361.067.000,00	-	-	47,80%	77,42%	68,86%

Sumber: Bagian Umum Sekeretariat Daerah Kab.Mempawah

Untuk Tahun 2020, nomenklatur keuangan yang digunakan oleh Sekretariat Daerah menggunakan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya untuk Tahun 2021, terjadi pemukhtahiran Permendagri No. 90 Tahun 2019 menjadi Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 selanjutnya telah digantikan atau diubah oleh peraturan yang lebih baru yaitu Kepmendagri No.050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi & Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah yang mulai diberlakukan sejak tahun 2022. Terakhir, Pengganti atau pembaruan atas Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 adalah Permendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 (Perubahan Pertama) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 (Perubahan Kedua). Pemutakhiran Permendagri tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah dilakukan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan dengan kewenangan daerah, memperbaiki basis data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mendukung akuntabilitas dan manajemen pembangunan daerah, serta mengisi kekosongan nomenklatur baru seiring perkembangan kebijakan dan dinamika pembangunan. Pemutakhiran ini juga bertujuan untuk menstandarkan kodefikasi secara nasional dan menjadi acuan baku untuk berbagai dokumen perencanaan dan keuangan daerah

Interpretasi dan Analisis Per Tahun:

Tahun 2020 – Realisasi 80,32%

- Terjadi penurunan aktivitas karena pandemi COVID-19.
- Banyak kegiatan rapat, perjalanan dinas, dan pengadaan yang dibatalkan atau ditunda.
- Fokus belanja lebih diarahkan ke penanganan COVID oleh dinas lain (misalnya Dinkes dan BPBD).

Tahun 2021 – Realisasi 89,28%

- Masih dalam masa transisi pemulihan pascapandemi.
- Progres sedikit membaik dibanding 2020, namun masih terkendala pada belanja barang dan jasa yang belum optimal.
- Beberapa program prioritas mulai dijalankan kembali.

Tahun 2022 – Realisasi 90,42%

- Pemulihan berjalan efektif, dengan tingkat realisasi sudah mencapai standar ideal (>90%).
- Belanja rutin dan operasional berjalan normal, termasuk kegiatan koordinasi lintas perangkat daerah.
- Percepatan digitalisasi dan pengadaan alat penunjang kerja mulai terlaksana.

Tahun 2023 – Realisasi 93,38%

- Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sangat optimal.
- Pengadaan dan proyek penguatan kelembagaan berjalan baik.

Tahun 2024 – Realisasi 96,77%

- Tahun dengan **serapan tertinggi** dalam 5 tahun.
- Diduga karena dorongan kinerja menjelang akhir masa jabatan kepala daerah atau karena adanya program prioritas daerah yang harus diselesaikan.
- Kemungkinan ada **efisiensi anggaran atau perubahan prioritas**, terutama menjelang transisi politik (misalnya menjelang Pilkada).
- Beberapa kegiatan strategis selesai lebih awal, menyisakan sisa anggaran yang tidak terserap.

Tren 5 Tahun: Stabil dan Meningkat

- Rata-rata realisasi selama 5 tahun: **90,03%**
- Kinerja anggaran meningkat signifikan setelah pandemi, menandakan perbaikan tata kelola keuangan dan koordinasi antar unit kerja.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan.

Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah selama periode perencanaan strategis.

Tabel 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1.	Bagian Pemerintahan	- Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) - Penataan dan penyesuaian batas wilayah administrasi pemerintahan (desa, kelurahan, kecamatan)	Perangkat Daerah
2.	Bagian Hukum	- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) - Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) - Pendampingan dan penyelesaian sengketa hukum	- Kepala Daerah & DPRD - Perangkat Daerah - Masyarakat umum - Lembaga eksternal

		yang melibatkan pemerintah daerah • Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	
3.	Bagian Kesbangpol	• Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) • Koordinasi dengan TNI/Polri, BIN, dan instansi vertikal lainnya • Fasilitasi kegiatan KPU, Bawaslu, dan partai politik di daerah • Fasilitasi kegiatan partai politik di daerah	• Masyarakat umum • Organisasi masyarakat (ormas, LSM) • Partai politik • Penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu) • Forum-forum kewaspadaan dini (FKUB, FKDM, FPK) • Instansi vertikal (TNI, Polri, BIN)
4.	Bagian Kesmenspirit	• Fasilitasi kegiatan keagamaan (peringatan hari besar keagamaan, MTQ, dll.) • Bantuan dana hibah ke lembaga keagamaan (masjid, gereja, yayasan) • Penyaluran bantuan kepada guru ngaji, rohaniwan, dan tokoh agama	• Masyarakat umum • Tokoh dan lembaga keagamaan • Organisasi sosial dan yayasan • Lembaga pendidikan informal dan keagamaan
5.	Bagian PPBJ	• Pengadaan melalui e-tendering (tender elektronik) • Pengelolaan dan pembaruan data pada Sistem	• Perangkat Daerah/ OPD • Penyedia Barang/ Jasa: perusahaan, kontraktor, konsultan

		<i>Informasi RUP dan LPSE</i> • <i>Pendampingan kepada perangkat daerah dalam menyusun spesifikasi teknis/ KAK</i>	• <i>Masyarakat Umum: akses informasi pengadaan (transparansi)</i> • <i>LKPP, Inspektorat, dan BPK</i>
6.	<i>Bagian Perekonomian</i>	• <i>Sinkronisasi program ekonomi antar-perangkat daerah</i> • <i>Koordinasi dengan TPID</i> • <i>Pembinaan, evaluasi, dan pengawasan BUMD (Bank Daerah, PDAM, dll)</i>	• <i>Perangkat Daerah</i> • <i>BUMD</i> • <i>Masyarakat Umum</i>
7.	<i>Bagian Umum</i>	• <i>Penyiapan dokumen dinas untuk kepala daerah</i> • <i>Distribusi dokumen antar perangkat daerah</i> • <i>Pengelolaan surat masuk dan keluar secara manual dan elektronik (SRIKANDI jika tersedia)</i>	• <i>Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i> • <i>Sekretaris Daerah</i> • <i>Seluruh Perangkat Daerah (untuk kebutuhan logistik dan surat-menyurat)</i> • <i>Masyarakat (secara tidak langsung, melalui keterbukaan informasi publik dan pelayanan acara resmi)</i>
8.	<i>Bagian Organisasi</i>	• <i>Kajian pembentukan, penggabungan, atau penghapusan perangkat daerah</i> • <i>Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)</i>	• <i>Perangkat Daerah/ OPD (dalam hal penataan struktur dan kinerja)</i> • <i>ASN/pegawai (terkait jabatan, beban kerja, dan evaluasi kinerja)</i> • <i>Tim RB dan SAKIP di tiap OPD</i>

		• <i>Identifikasi dan fasilitasi inovasi pelayanan public</i> • <i>Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)</i> • <i>Fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) perangkat daerah</i>	• <i>Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah (sebagai pengambil keputusan organisasi)</i>
9.	<i>Bagian Humas Protokol</i>	• <i>Pengelolaan dan penyebaran informasi kegiatan pemerintahan daerah</i> • <i>Penulisan dan rilis berita resmi pemerintah</i> • <i>Dokumentasi foto dan video kegiatan resmi kepala daerah/ wakil kepala daerah</i> • <i>Pendampingan kegiatan kepala daerah dan pejabat dalam acara protokoler</i>	• <i>Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i> • <i>Perangkat Daerah/ OPD</i> • <i>Media dan Wartawan</i> • <i>Masyarakat umum (sebagai penerima informasi)</i> • <i>Tamu Pemerintah Daerah (dalam kegiatan protokol resmi)</i>

Sumber: Seluruh Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah

Tabel di atas menggambarkan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan layanan oleh Sekretariat Daerah pada periode ini. Setiap kelompok sasaran ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, yang mempengaruhi desain dan implementasi layanan yang diberikan. Penyusunan dan pemilihan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok sasaran, Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah dapat menyusun strategi yang lebih terarah dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, hal ini juga memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program yang lebih efektif, sehingga pencapaian hasil yang diinginkan dapat lebih optimal.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan (jika ada)

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah. Berikut ini adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah:

Tabel 2.5 Mitra Perangkat Daerah

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, Kelurahan)	Penyusunan kebijakan daerah	Pelaksanaan program kegiatan lintas sektor
2	DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Persidangan	Penyusunan Perda, pembahasan APBD, pengawasan kebijakan daerah
3	Instansi Vertikal (Polri, TNI, KPU, Bawaslu)	Penyusunan kebijakan daerah	Koordinasi keamanan, pertahanan, pemilu, dan administrasi pertanahan
4	BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)	Pemeriksaan	Pemeriksaan laporan keuangan daerah
5	Media Massa dan Pers	Peliputan	Publikasi dan penguatan citra pemerintah

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
6	Akademisi/Perguruan Tinggi	Kajian kebijakan publik, penelitian, pengabdian masyarakat	Kajian ilmiah, inovasi, dan pengembangan kebijakan
7	Dunia Usaha dan BUMD/BUMN	Kemitraan dalam pembangunan ekonomi daerah dan CSR	Investasi, CSR, kemitraan pembangunan daerah

Mitra-mitra yang tercantum dalam tabel ini memiliki peran penting dalam memperkuat penyelenggaraan layanan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah. Kolaborasi yang terjalin antara perangkat daerah dengan mitra ini menunjukkan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan bersama, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan mampu tercipta pelayanan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah (jika ada)

Untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah yang telah ditetapkan, sinergi antara elemen-elemen pemerintahan daerah sangat penting, termasuk kerja sama antara perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebagai entitas yang dimiliki pemerintah daerah, BUMD memegang peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah melalui penyediaan layanan publik, penguatan ekonomi lokal, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peran dan dukungan BUMD terhadap kinerja perangkat daerah meliputi kolaborasi dalam pelaksanaan program, penyediaan infrastruktur atau sarana pendukung, serta keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. BUMD juga dapat berfungsi sebagai mitra strategis dalam memperluas jangkauan layanan kepada kelompok sasaran yang lebih luas.

Berikut adalah dukungan BUMD terhadap pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah

**Tabel 2.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah**

No	Nama BUMD	Bentuk Dukungan	Dukungan terhadap kinerja
1.	PDAM	Pengawasan kualitas Air Minum	Meningkatkan kualitas air minum
2.	Bank Kalbar	Kerja sama pembiayaan, pengelolaan dana	Meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah, penguatan ekonomi UMKM, digitalisasi transaksi, dan program sosial (CSR)

Tabel di atas mengilustrasikan kontribusi BUMD dalam mendukung kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah secara lebih spesifik. Kontribusi yang diberikan oleh BUMD tidak hanya berupa penyediaan sumber daya atau dukungan finansial, tetapi juga dalam bentuk kemitraan yang strategis untuk mewujudkan keberhasilan program-program daerah. Melalui kerjasama yang efektif dengan BUMD, Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah dapat meningkatkan kapasitas pelayanan, mempercepat pencapaian target-target kinerja, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah.

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah (jika ada)

Kerja sama daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sekretarat Daerah Kabupaten Mempawah memiliki tanggung jawab strategis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi setiap kerja sama yang dilakukan, baik antar daerah maupun dengan pihak

ketiga. Kerja sama ini harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi.

Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah bertugas untuk memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama yang dijalin dapat mendukung tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Identifikasi terhadap jenis kerja sama yang telah dilakukan dan evaluasi pelaksanaannya sangat diperlukan untuk menilai efektivitas serta keberlanjutan dari kerja sama tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerja sama yang dilakukan memberikan manfaat yang optimal bagi daerah dan masyarakat, serta memastikan kesesuaiannya dengan rencana pembangunan daerah yang ada.

Tabel 2.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

No	Mitra Kerja Sama	Jenis Kerja Sama	Dukungan terhadap kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemerintah Kota Pontianak	Pemasangan pilar batas daerah antara Kabupaten Mempawah dengan Kota Pontianak	Penegasan batas wilayah
2	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Pengendalian inflasi daerah berbasis kawasan	Upaya membangun komunikasi yang efektif antara pemkab Mempawah dengan daerah penghasil (supplier) guna kelancaran distribusi, ketersediaan dan kestabilan harga komoditi dalam wilayah kab. mempawah

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Mempawah

Kerja sama daerah yang tercantum dalam tabel ini memainkan peran penting dalam mendukung kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kerja sama ini memungkinkan PD untuk memperluas kapasitas dan cakupan layanan yang diberikan, baik melalui penyediaan sumber daya, pembagian tanggung jawab, maupun koordinasi dalam pelaksanaan program-program prioritas. Dengan adanya

sinergi ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja lebih efektif, mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta memaksimalkan pencapaian hasil yang diinginkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya manajemen sumber daya aparatur dalam rangka peningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja	Manajemen sumber daya aparatur belum dikelola secara optimal sehingga berdampak pada rendahnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi.	1. Kurangnya kompetensi dan pelatihan aparatur sehingga tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara maksimal. 2. Sistem pengelolaan sumber daya manusia yang kurang efektif, termasuk dalam hal rekrutmen, penempatan, dan pengembangan karier.

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			3. Motivasi dan disiplin aparaturnya yang rendah akibat kurangnya insentif dan penghargaan yang memadai. 4. Kurangnya penggunaan teknologi informasi dalam proses manajemen aparaturnya yang menyebabkan proses administrasi dan pengawasan menjadi kurang efisien. 5. Koordinasi dan komunikasi yang lemah antar unit kerja yang mengakibatkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja. 6. Keterbatasan anggaran dan sumber daya pendukung yang membatasi optimalisasi pengelolaan aparaturnya.
2	Kualitas pelayanan administrasi umum dan kesekretariatan belum memenuhi standar pelayanan prima	Sistem dan prosedur pelayanan administrasi umum serta kesekretariatan belum berjalan	1. Prosedur kerja yang kurang jelas dan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga menghambat kelancaran pelayanan. 2. Sarana dan prasarana pendukung

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		secara efektif dan efisien.	pelayanan yang belum memadai, seperti perangkat teknologi dan ruang kerja. 3. Motivasi dan disiplin pegawai yang rendah dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan. 4. Kurangnya pengawasan dan evaluasi berkala terhadap proses pelayanan administrasi dan kesekretariatan. 5. Sistem informasi dan teknologi yang belum optimal dalam mendukung proses administrasi dan kesekretariatan. 6. Komunikasi yang kurang efektif antar bagian dan dengan pengguna layanan, sehingga terjadi miskomunikasi dan penundaan pelayanan.

Sumber: Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Mempawah

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah. Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini

akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan isu strategis pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah didasarkan pada Potensi dan Permasalahan, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, KLHS RPJMD, dan RPJMD Kabupaten Mempawah dengan rincian sebagai berikut:

2.2.2.1 Isu Global

Isu global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang bersifat lintas negara dan dapat memengaruhi negara serta daerah. Isu ini mencakup perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik internasional yang mempengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Isu global yang relevan dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran Kinerja Berbasis Outcome dan Impact

Pengukuran Kinerja Berbasis Outcome dan Impact adalah pendekatan evaluasi yang berfokus pada hasil jangka menengah (outcome) dan jangka panjang (impact) dari suatu program, proyek, atau kebijakan, bukan hanya pada output atau aktivitas yang dilakukan. Ini memberikan gambaran lebih utuh tentang efektivitas dan keberlanjutan suatu intervensi. Meskipun lebih menantang, pendekatan ini penting untuk menciptakan dampak sosial yang bermakna dan terukur.

2. Digitalisasi dan Transformasi Layanan Publik

Digitalisasi layanan publik adalah proses mengubah layanan manual atau fisik menjadi digital dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sedangkan transformasi layanan publik merupakan perubahan menyeluruh dalam cara pemerintah memberikan layanan, tidak hanya dengan digitalisasi, tetapi juga dengan reformasi proses bisnis, kebijakan, dan budaya kerja, agar lebih responsif, efisien, dan

berorientasi pada masyarakat. Digitalisasi dan transformasi layanan publik bertujuan menciptakan birokrasi yang lebih adaptif, efisien, dan berfokus pada kepentingan masyarakat. Keberhasilannya tergantung pada kesiapan teknologi, SDM, regulasi, dan budaya kerja yang terus berkembang.

2.2.2.2 Isu Nasional

Pengisian isu nasional dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan dengan mengidentifikasi isu yang relevan, dapat berasal dari kebijakan pemerintah pusat, hasil evaluasi pembangunan, serta perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang terjadi di tingkat nasional. Sumber informasi yang digunakan dalam identifikasi ini meliputi dokumen perencanaan nasional seperti RPJMN, RPJPN, Renstra K/L, dan data makro ekonomi dan sosial. Setelah isu nasional teridentifikasi, langkah berikutnya adalah memetakan relevansinya dengan kondisi daerah, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Isu nasional yang relevan dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut:

1. Sistem pengukuran kinerja yang belum berbasis outcome secara konsisten

Sistem pengukuran kinerja yang belum berbasis outcome secara konsisten masih menjadi kendala dalam menciptakan pelayanan publik yang berdampak nyata. Perlu pergeseran paradigma dari sekadar "melaksanakan kegiatan" ke "menciptakan hasil dan perubahan".

2. Kesenjangan Akses dan Kualitas Layanan

Kesenjangan akses dan kualitas layanan adalah masalah nyata yang menghambat keadilan sosial dan pembangunan yang merata. Mengatasinya memerlukan komitmen pemerataan layanan, baik dari sisi infrastruktur, SDM, kebijakan, hingga pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat.

2.2.2.3 Isu Regional

Isu regional dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merujuk pada tantangan dan prioritas yang dihadapi di level provinsi. Isu ini dapat mencakup masalah seperti ketimpangan pembangunan antar wilayah, pengelolaan sumber daya alam, peningkatan infrastruktur, atau

penguatan sektor ekonomi unggulan lokal. Identifikasi isu regional dilakukan dengan memperhatikan kondisi spesifik daerah, hasil evaluasi capaian pembangunan, serta kebutuhan masyarakat setempat.

1. Keterbatasan integrasi data kinerja antar kabupaten/kota

Keterbatasan integrasi data kinerja antar kabupaten/kota mengacu pada kurangnya keselarasan, keterhubungan, dan interoperabilitas data kinerja pembangunan, program, atau layanan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Artinya, data kinerja tidak terstandar, tidak saling terhubung, atau bahkan tidak bisa dibandingkan antar daerah, sehingga menyulitkan evaluasi secara nasional maupun regional.

2. Ketimpangan Layanan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi

Ketimpangan layanan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi merujuk pada perbedaan yang signifikan dalam kualitas, aksesibilitas, dan efektivitas layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah antar wilayah administratif di satu provinsi. Di satu provinsi, ibu kota kabupaten sudah memiliki RSUD bertaraf nasional, sedangkan kabupaten tetangga masih kekurangan dokter dan peralatan dasar.

2.2.2.4 Potensi Daerah

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, potensi daerah menjadi salah satu sumber utama dalam perumusan isu strategis. Pemanfaatan potensi daerah secara optimal tidak hanya mendukung percepatan pembangunan, tetapi juga mendorong kemandirian dan daya saing daerah. Oleh karena itu, potensi unggulan daerah perlu diidentifikasi sebagai isu strategis yang dapat diarahkan menjadi kekuatan pembangunan. Adapun potensi daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah antara lain:

1. Potensi Tata Kelola Pemerintahan

Peran Sekretariat Daerah adalah mengkoordinasikan seluruh OPD agar pemerintahan berjalan efisien, efektif, dan akuntabel dan mengelola potensi daerah dalam bentuk inovasi pelayanan publik, efisiensi birokrasi, dan reformasi SOTK.

2. Potensi Digitalisasi Layanan

Digitalisasi layanan adalah proses mengubah layanan yang sebelumnya manual, tatap muka, atau berbasis dokumen fisik menjadi layanan berbasis teknologi digital. Hal ini mencakup penggunaan aplikasi, website, sistem informasi, dan platform digital lainnya untuk memberikan pelayanan publik atau swasta secara lebih efisien, cepat, dan terjangkau.

Sekretariat Daerah tidak mengelola langsung sektor-sektor teknis, tapi berperan penting dalam mengoptimalkan potensi daerah melalui peran administratif, koordinatif, dan kebijakan lintas sektor. Dengan fungsi ini, Setda menjadi motor penggerak agar potensi daerah bisa berkembang secara terintegrasi.

Sebagai tindak lanjut dari hasil telaah terhadap berbagai sumber yang telah dijelaskan, perlu dilakukan integrasi untuk mengidentifikasi isu strategis Sekretariat Daerah secara komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi daerah, permasalahan pelayanan, Renstra Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, KLHS RPJMD, RPJMD Kabupaten Mempawah dan dokumen perencanaan lainnya. Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.9 Perumusan Isu Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEMENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLUHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Potensi Tata Kelola Pemerintahan	Belum optimalnya manajemen sumber daya aparatur dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja	Kurangnya transparansi dalam pelaporan kinerja	Pengukuran Kinerja Berbasis Outcome dan Impact	Sistem pengukuran kinerja yang belum berbasis outcome secara	Keterbatasan integrasi data kinerja antar kabupaten/kota	Belum optimalnya kualitas pelayanan, akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Potensi Digitalisasi Layanan	Kualitas pelayanan administrasi umum dan kesekretariatan belum memenuhi standar pelayanan prima	Tata kelola pelayanan publik belum transparan dan akuntabel	Digitalisasi dan Transformasi Layanan Publik	Kesenjangan Akses dan Kualitas Layanan	Ketimpangan Layanan Antar Kabupaten/ Kota dalam Provinsi	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi berbasis standar pelayanan minimal dan digitalisasi

Sumber: Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Mempawah

Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu strategis, sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebelumnya, telah teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama Sekretariat Darah Kabupaten Mempawah. Isu-isu tersebut merepresentasikan kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pemenuhan mandat Sekretariat Daerah. Isu strategis ini selanjutnya digunakan sebagai

landasan dalam perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan Sekretariat Daerah. Uraian lebih lanjut mengenai isu strategis Sekretariat Daerah dapat disajikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan, akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi berbasis standar pelayanan minimal dan digitalisasi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi Kabupaten Mempawah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Cerdas, Mandiri, Terdepan, dan Berkelanjutan”

Adapun misi Kabupaten Mempawah dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan professional

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Tujuan ini secara langsung mencerminkan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan tata kelola yang

lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah

Misi 2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia / Indeks Modal Manusia.

Misi 3. Membangun infrastruktur publik secara merata dan berwawasan lingkungan

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatnya kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dan Meningkatnya ketahanan daerah. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Infrastruktur dan Indeks Ketahanan Daerah.

Misi 4. Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi unggulan dan peningkatan investasi

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan Meningkatkan kemandirian ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan ini diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah berperan dalam mendukung misi ke-1, tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas dengan sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dari RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas (1. PermenPAN-RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Permendagri No. 86 Tahun 2017 untuk perencanaan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah 3. Permendagri No. 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan LPPD 4. PP No. 13 Tahun 2019 tentang LPPD Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Inovasi dan Transparansi)	Meningkatnya Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien serta meningkatnya kualitas pelayanan publik		1. Nilai SAKIP Daerah	63,54	64	64,5	65	65,5	66	
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	81	82	83	84	85	
		Meningkatnya kinerja pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	11	12	12,5	13	13,5	14	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	71	71,5	72	72,5	73	73,5	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD Kabupaten Mempawah	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	
Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi (1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. PermenPAN-RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik)		Meningkatnya pelayanan publik dan pelayanan administrasi pada pimpinan daerah dan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Kesekretariatan	80	81	82	83	84	85	

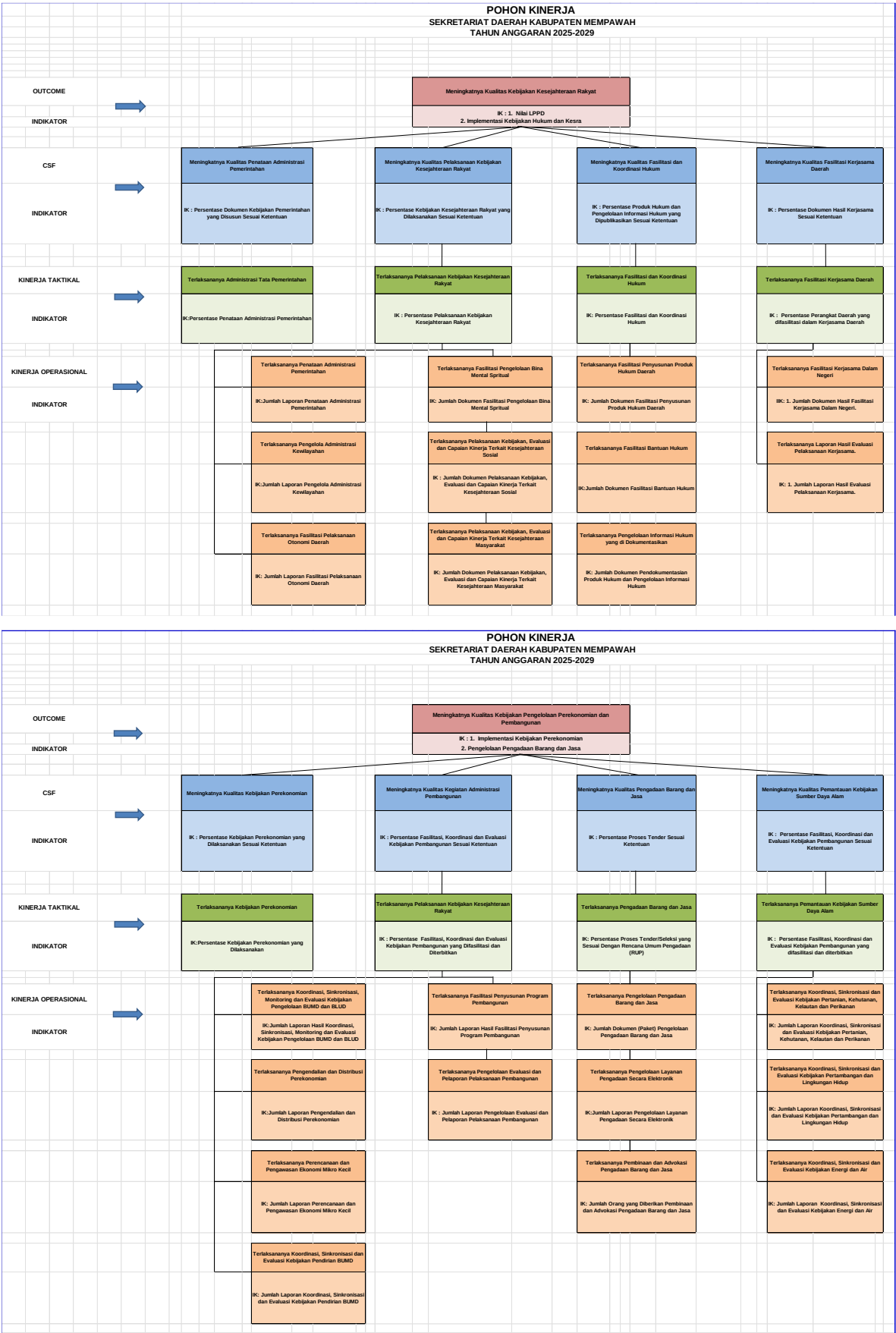
Sumber: Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Mempawah

Perumusan tujuan dan sasaran di atas juga didasarkan pada pendekatan *logical framework* dan pohon kinerja. Berikut ini disajikan gambaran mengenai *logical framework* dan pohon kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah, yang merupakan alat untuk memetakan hubungan antara input, output, outcome, dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur.

Gambar 3.1 Logical Framework Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah

TUJUAN	Meningkatnya Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien serta meningkatnya kualitas pelayanan publik			
INDIKATOR TUJUAN	1. Nilai SAKIP Daerah 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
SASARAN	Meningkatnya kinerja pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya pelayanan publik dan pelayanan administrasi pada pimpinan daerah dan perangkat daerah
INDIKATOR SASARAN	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	Nilai SAKIP OPD	Nilai LPPD Kabupaten Mempawah	Indeks Kepuasan Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Kesekretariatan
PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 2. Program Perekonomian Dan Pembangunan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
KEGIATAN	Penataan Organisasi		1. Administrasi Tata Pemerintahan 2. Fasilitasi Kerjasama Daerah 3. Fasilitasi dan koordinasi hukum 4. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 5. Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi 6. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 7. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 8. Pengelolaan Pengdaan Barang Dan Jasa	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 10. Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah 11. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Gambar 3.2 Pohon Kinerja Sekretariat Daerah Kab. Mempawah



3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

3.2.1 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/subkegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra PD. Selain itu, strategi Sekretariat Daerah juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Berikut ini adalah proses perumusan strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah, yang meliputi antara lain:

**Tabel 3.2 Penentuan Strategi
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah**

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
1	Belum optimalnya manajemen sumber daya aparatur dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja	Tujuan: Meningkatnya Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien serta meningkatnya kualitas pelayanan publik Sasaran : 1. Meningkatnya kinerja pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 3. Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan	1. Meningkatnya rata-rata nilai capaian kinerja pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar unit kerja dalam perangkat daerah untuk mendukung pencapaian target kinerja bersama. 3. Meningkatkan Pelaporan Kinerja Pemerintahan

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
		Pemerintah Daerah	
2	Kualitas pelayanan administrasi umum dan kesekretariatan belum memenuhi standar pelayanan prima	Tujuan: Meningkatnya Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien serta meningkatnya kualitas pelayanan publik Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada Sekretariat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3.2.2 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang:

Tabel 3.3 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
Penguatan Dokumen dan Pemahaman Dasar SAKIP	Monitoring & Evaluasi Kinerja Berkala	Efisiensi Anggaran & Kinerja Terintegrasi	Kinerja Berbasis Hasil & Budaya Akuntabilitas	Penguatan Tata Kelola Berkelanjutan
Arah Kebijakan: - Penguatan penyusunan dokumen perencanaan kinerja - Peningkatan kapasitas SDM dalam pemahaman konsep SAKIP - Integrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.	Arah Kebijakan: - Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, terstruktur, dan berbasis data. - Penguatan fungsi pengawasan internal terhadap capaian kinerja dan pelaksanaan program.	Arah Kebijakan: - Peningkatan efisiensi belanja dengan memastikan output dan outcome tercapai secara optimal. - Penyesuaian program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi efektivitas anggaran dan kinerja.	Arah Kebijakan: - Transformasi sistem kinerja dari rutinitas administratif menjadi pencapaian hasil nyata (outcome). - Penanaman nilai akuntabilitas sebagai bagian dari budaya kerja organisasi.	Arah Kebijakan: - Penerapan prinsip good governance: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan keadilan. - Penguatan kelembagaan dan sistem pengambilan keputusan berbasis data dan bukti.
Fokus Program - Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan kinerja bagi perangkat daerah di kabupaten mempawah - Review dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan anggaran yang sudah dibuat	Fokus Program - Pelaksanaan Monev Berkala bagi OPD di Kabupaten Mempawah - Evaluasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan bagi OPD di Kabupaten Mempawah	Fokus Program - Integrasi Perencanaan dan Penganggaran bagi OPD di Kabupaten Mempawah - Optimalisasi Penggunaan Anggaran bagi OPD di Kabupaten Mempawah	Fokus Program - Penguatan Perencanaan dan Indikator Kinerja Berbasis Hasil bagi OPD di Kabupaten Mempawah - Implementasi Manajemen Kinerja Individu & Organisasi bagi OPD di Kabupaten Mempawah	Fokus Program - Penguatan Sistem dan Proses Tata Kelola bagi OPD di Kabupaten Mempawah - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola bagi OPD di Kabupaten Mempawah

oleh OPD di wilayah Kabupaten Mempawah. 3. Pelatihan dasar dan lanjutan SAKIP untuk pegawai dilingkungan OPD yng ada di wilayah kabupaten Mempawah				
Target Kerja Indikatif 1. Persentase unit kerja memiliki dokumen kinerja yang lengkap dan sesuai (90%) 2. Jumlah dokumen kinerja yang direviu dan diselaraskan (31 dokumen) 3. Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek SAKIP (10 orang)	Target Kerja Indikatif 1. Persentase pelaksanaan monitoring kinerja tepat waktu (100%) 2. Jumlah laporan Monev kinerja yang disusun (4 Laporan)	Target Kerja Indikatif 1. Persentase program/kegiatan dengan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi (100%) 2. Persentase efisiensi belanja operasional (10%)	Target Kerja Indikatif 1. Persentase indikator kinerja yang berorientasi hasil (outcome) (80%) 2. Persentase pegawai dengan SKP berbasis kinerja organisasi (100%)	Target Kerja Indikatif 1. Persentase SOP tata kelola yang disesuaikan dengan prinsip keberlanjutan (90%) 2. Persentase program prioritas yang telah dianalisis keberlanjutannya (80%)
Penguatan Data & Pemahaman Teknis LPPD	Validasi Data & Kepatuhan Pelaporan	Sinkronisasi LPPD – SAKIP – SPBE – RKPD	Pemanfaatan LPPD dalam Pengambilan Kebijakan	Kelembagaan dan Budaya Kinerja Berbasis Data

Arah Kebijakan: - Mewujudkan pelaporan LPPD yang tepat waktu, berbasis bukti, dan berkesinambungan. - Peningkatan akurasi dan kelengkapan data LPPD sesuai indikator kinerja urusan pemerintahan.	Arah Kebijakan: - Penguatan sistem validasi dan verifikasi data internal perangkat daerah. - Mendorong penggunaan data yang valid sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan.	Arah Kebijakan: - Sinkronisasi indikator dan dokumen antara LPPD, SAKIP, SPBE, dan RKPD. - Penguatan data dan informasi kinerja yang konsisten dan lintas sistem.	Arah Kebijakan: - Meningkatkan kualitas data dan informasi dalam LPPD yang relevan dan akurat. - Mewujudkan tata kelola berbasis bukti (evidence-based governance) yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.	Arah Kebijakan: - Penguatan struktur organisasi dan mekanisme kerja yang mendukung pengelolaan data kinerja secara efektif. - Pengembangan budaya kerja yang menjadikan data sebagai dasar utama pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja.
Fokus Program - Peningkatan Kualitas Pelaporan LPPD Kabupaten Mempawah - Pembenahan dan Validasi Data LPPD Kabupaten Mempawah	Fokus Program - Penguatan Mekanisme Validasi Data OPD di Kabupaten Mempawah - Peningkatan Kapasitas SDM dan Sistem Pendukung bagi OPD di Kabupaten Mempawah	Fokus Program - Sinkronisasi Indikator dan Dokumen Kinerja bagi OPD di Kabupaten Mempawah - Penguatan Kapasitas Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Mempawah	Fokus Program - Penguatan Kapasitas Analisis LPPD Kabupaten Mempawah - Integrasi Hasil LPPD dalam Perencanaan dan Evaluasi di Kabupaten Mempawah	Fokus Program - Pembentukan Budaya Kerja Berbasis Data bagi OPD di wilayah Kabupaten Mempawah - Penguatan Sistem dan Infrastruktur Data di wilayah Kabupaten Mempawah

Target Kerja Indikatif 1. Persentase indikator LPPD yang terisi lengkap dan valid (95%) 2. Persentase perangkat daerah yang menyampaikan data LPPD tepat waktu (100%)	Target Kerja Indikatif 1. Persentase laporan dengan data yang tervalidasi dan bebas kesalahan (95%) 2. Persentase perangkat daerah yang menyampaikan data LPPD tepat waktu (100%)	Target Kerja Indikatif 1. Persentase indikator yang sinkron antar dokumen (RKPD, LPPD, SAKIP, SPBE) (90%) 2. Jumlah OPD yang menggunakan data dan indikator terintegrasi (100%)	Target Kerja Indikatif 1. Persentase kebijakan/program yang direvisi atau disusun berdasarkan hasil LPPD (70%) 2. Jumlah forum diskusi kebijakan berbasis LPPD yang diselenggarakan (2 forum/tahun)	Target Kerja Indikatif 1. Terbentuknya unit pengelola data kinerja di seluruh OPD (100%) 2. Tingkat pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan operasional dan strategis (85%)
Pemetaan dan Standarisasi Pelayanan	Konsolidasi dan Konsistensi Pelayanan	Digitalisasi dan Integrasi Layanan	Pelayanan Responsif dan Berorientasi Pengguna	Pelayanan Prima dan Berkelanjutan
Arah Kebijakan: 1. Identifikasi jenis dan cakupan layanan publik yang ada di seluruh unit kerja. 2. Penyusunan standar pelayanan yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Arah Kebijakan: 1. Penguatan koordinasi antar unit kerja dalam penyelenggaraan layanan. 2. Mendorong kontinuitas pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan.	Arah Kebijakan: 1. Penguatan koordinasi antar unit kerja dalam penyelenggaraan layanan. 2. Mendorong kontinuitas pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan.	Arah Kebijakan: 1. Penyediaan layanan yang mudah diakses, cepat, dan ramah pengguna. 2. Implementasi inovasi layanan berbasis teknologi untuk meningkatkan kemudahan dan kecepatan pelayanan.	Arah Kebijakan: 1. Peningkatan mutu layanan yang konsisten dan profesional. 2. Menjamin keberlanjutan pelayanan melalui manajemen risiko dan pendanaan yang memadai.

Fokus Program 1. Pemetaan Layanan Publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah 2. Penyusunan dan Revisi Standar Pelayanan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah	Fokus Program 1. Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah 2. Standardisasi dan Harmonisasi Proses Layanan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah	Fokus Program 1. Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah 2. Standardisasi dan Harmonisasi Proses Layanan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah	Fokus Program 1. Penyederhanaan Prosedur dan Peningkatan Akses Layanan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah 2. Peningkatan Kapasitas Petugas Layanan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah	Fokus Program 1. Evaluasi rutin dan audit mutu pelayanan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah 2. Penyusunan rencana keberlanjutan layanan dan pendanaan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
Target Kerja Indikatif 1. Persentase layanan yang telah dipetakan secara lengkap (100%) 2. Persentase layanan yang memiliki standar pelayanan resmi (90%)	Target Kerja Indikatif 1. Skor kepuasan masyarakat terhadap konsistensi pelayanan (85%) 2. Tingkat kepatuhan pelaksana SOP oleh petugas layanan (90%)	Target Kerja Indikatif 1. Skor kepuasan masyarakat terhadap konsistensi pelayanan (85%) 2. Tingkat kepatuhan pelaksana SOP oleh petugas layanan (90%)	Target Kerja Indikatif 1. Persentase layanan yang telah disederhanakan prosedurnya (80%) 2. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti tepat waktu (95%)	Target Kerja Indikatif 1. Persentase layanan yang memenuhi standar pelayanan prima (95%) 2. Rencana keberlanjutan layanan yang tersusun dan diimplementasikan (100%)

Sumber: Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Mempawah

3.2.3 Arah Kebijakan Perangkat daerah

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain itu arah kebijakan Renstra PD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kab. Mempawah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel dan Berintegritas	Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Inovasi dan Transparansi	Membina dan memfasilitasi OPD dalam penyusunan SAKIP	
			Melakukan asistensi dan menghimpun hasil kinerja seluruh bagian secara berkala	
		Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Inovasi dan Transparansi	Membina dan memfasilitasi OPD dalam penyusunan LPPD	
			Melakukan asistensi dan menghimpun hasil kinerja seluruh bagian secara berkala	
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar kualitas pelayanan publik terus meningkat	

Sumber: Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Mempawah

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III (Tiga) dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini. Program, kegiatan, dan subkegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah, yang merupakan hasil dari *cascading* tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian *outcome* dan *output* yang diharapkan.

**Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel dan Berintegritas	Meningkatnya Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien serta Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Nilai SAKIP Daerah		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
		Meningkatnya Kinerja Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			Nilai SAKIP komponen pelaporan		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKI OPD		
			Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan		Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi	Persentase Capaian Penataan Organisasi	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi dan Birokrasi	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			Nilai LPPD kabupaten mempawah		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Perangkat Daerah Yang Menyusun LPPD	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	

					Persentase Implementasi Kebijakan Hukum dan Kesra	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Meningkatnya Kualitas Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintahan yang Disusun	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
				Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Diublikasikan	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
					Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
					Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum	
					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	

				Meningkatnya Kualitas Fasilitas Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen hasil kerjasama	4.01.02.2.04 - Fasilitas Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	4.01.02.2.04.0001 - Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan		Persentase Implementasi Kebijakan Perekonomian	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Persentase Pengadaan Barang/ Jasa yang Sesuai Dengan Ketentuan	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian	Jumlah kebijakan perekonomian yang dilaksanakan	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	4.01.03.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	
				Meningkatnya Kualitas Kegiatan Administrasi Pembangunan	Persentase Fasilitas Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan pembangunan yang Difasilitasi dan diterbitkan	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4.01.03.2.02.0001 - Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4.01.03.2.02.0002 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	

				Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase proses tender/ seleksi yang sesuai dengan rencana umum pengadaan (RUP)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengdaan Barang Dan Jasa					
				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					
				Meningkatnya Kualitas Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Fasilitasi Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan pembangunan yang Difasilitasi dan diterbitkan	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan					
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	4.01.03.2.04.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup					
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4.01.03.2.04.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air					
				Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi		Meningkatnya Pelayanan Publik dan Pelayanan Administrasi pada Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah		Indeks kepuasan pimpinan daerah dan perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan		
							Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan		Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pesentase tingkat pelaksanaan administrasi keuangan	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		4.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran		4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

				Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Daerah pada Perangkat Daerah	Pesentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik daerah	4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pesentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	4.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Knntror	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4.01.01.2.06.0005 - Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

				Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dapat difasilitasi	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Fasilitas Kerumahtanggaan	Jumlah Paket Kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang dapat difasilitasi	4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	

					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tingkat Kepuasan Pimpinan atas pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4.01.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan	

Sumber: Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab.Mempawah

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya

**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				67.976.808.289,00		65.245.464.471,00		67.692.967.932,00		70.292.554.890,71		70.297.554.890,71	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				34.166.723.189,00		39.033.793.863,00		40.207.333.863,00		41.392.681.863,00		41.392.681.863,00	
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	90	92	34.166.723.189,00	93	39.033.793.863,00	94	40.207.333.863,00	95	41.392.681.863,00	96	41.392.681.863,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				39.003.300,00		45.998.450,00		48.998.450,00		51.998.450,00		51.998.450,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1	1	3.499.600,00	1	4.499.600,00	1	4.999.600,00	1	5.499.600,00	1	5.499.600,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	3.499.900,00	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	9.999.800,00	2	10.999.900,00	2	11.499.900,00	2	11.999.900,00	2	11.999.900,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	14.999.300,00	1	15.999.350,00	1	16.499.350,00	1	16.999.350,00	1	16.999.350,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	1	3.499.600,00	1	4.499.600,00	1	4.999.600,00	1	5.499.600,00	1	5.499.600,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	3.505.100,00	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9.999.800,00		10.999.900,00		11.499.900,00		11.999.900,00		11.999.900,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	9.999.800,00	2	10.999.900,00	2	11.499.900,00	2	11.999.900,00	2	11.999.900,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				3.499.600,00		4.499.600,00		4.999.600,00		5.499.600,00		5.499.600,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah



Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	3.499.600,00	1	4.499.600,00	1	4.999.600,00	1	5.499.600,00	1	5.499.600,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3.505.100,00		5.000.000,00		5.500.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	3.505.100,00	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.499.600,00		4.499.600,00		4.999.600,00		5.499.600,00		5.499.600,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	3.499.600,00	1	4.499.600,00	1	4.999.600,00	1	5.499.600,00	1	5.499.600,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				3.499.900,00		5.000.000,00		5.500.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	3.499.900,00	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14.999.300,00		15.999.350,00		16.499.350,00		16.999.350,00		16.999.350,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	14.999.300,00	1	15.999.350,00	1	16.499.350,00	1	16.999.350,00	1	16.999.350,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.838.195.656,00		15.895.957.856,00		15.897.457.856,00		15.898.957.856,00		15.898.957.856,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1820	1820	15.657.567.856,00	1820	15.657.567.856,00	1820	15.657.567.856,00	1820	15.657.567.856,00	1820	15.657.567.856,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	1	7.499.300,00	1	13.500.000,00	1	14.000.000,00	1	14.500.000,00	1	14.500.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah

	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	26.999.700,00	1	27.500.000,00	1	28.000.000,00	1	28.500.000,00	1	28.500.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	146.128.800,00	12	197.390.000,00	12	197.890.000,00	12	198.390.000,00	12	198.390.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				15.657.567.856,00		15.657.567.856,00		15.657.567.856,00		15.657.567.856,00		15.657.567.856,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1820	1820	15.657.567.856,00	1820	15.657.567.856,00	1820	15.657.567.856,00	1820	15.657.567.856,00	1820	15.657.567.856,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				146.128.800,00		197.390.000,00		197.890.000,00		198.390.000,00		198.390.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	146.128.800,00	12	197.390.000,00	12	197.890.000,00	12	198.390.000,00	12	198.390.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				26.999.700,00		27.500.000,00		28.000.000,00		28.500.000,00		28.500.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	26.999.700,00	1	27.500.000,00	1	28.000.000,00	1	28.500.000,00	1	28.500.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				7.499.300,00		13.500.000,00		14.000.000,00		14.500.000,00		14.500.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	7.499.300,00	1	13.500.000,00	1	14.000.000,00	1	14.500.000,00	1	14.500.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				29.159.800,00		29.159.800,00		29.159.800,00		29.159.800,00		29.159.800,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	8	29.159.800,00	8	29.159.800,00	8	29.159.800,00	8	29.159.800,00	8	29.159.800,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				29.159.800,00		29.159.800,00		29.159.800,00		29.159.800,00		29.159.800,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	8	29.159.800,00	8	29.159.800,00	8	29.159.800,00	8	29.159.800,00	8	29.159.800,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah



4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				135.000.000,00		323.307.200,00		323.307.200,00		323.307.200,00		323.307.200,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	-	4	21.250.000,00	4	21.250.000,00	4	21.250.000,00	4	21.250.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30	40	135.000.000,00	40	180.000.000,00	40	180.000.000,00	40	180.000.000,00	40	180.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	-	1	122.057.200,00	1	122.057.200,00	1	122.057.200,00	1	122.057.200,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				-		122.057.200,00		122.057.200,00		122.057.200,00		122.057.200,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	-	1	122.057.200,00	1	122.057.200,00	1	122.057.200,00	1	122.057.200,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				-		21.250.000,00		21.250.000,00		21.250.000,00		21.250.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	-	4	21.250.000,00	4	21.250.000,00	4	21.250.000,00	4	21.250.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				135.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30	40	135.000.000,00	40	180.000.000,00	40	180.000.000,00	40	180.000.000,00	40	180.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.095.336.600,00		2.269.797.400,00		2.269.797.400,00		2.269.797.400,00		2.269.797.400,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	148.380.300,00	12	152.827.900,00	12	152.827.900,00	12	152.827.900,00	12	152.827.900,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	134.988.900,00	12	135.000.000,00	12	135.000.000,00	12	135.000.000,00	12	135.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	94.997.900,00	12	95.000.000,00	12	95.000.000,00	12	95.000.000,00	12	95.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	14.999.500,00	2	14.999.500,00	2	14.999.500,00	2	14.999.500,00	2	14.999.500,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	4	14.970.000,00	4	14.970.000,00	4	14.970.000,00	4	14.970.000,00	4	14.970.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100	555.000.000,00	100	725.000.000,00	100	725.000.000,00	100	725.000.000,00	100	725.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	1.132.000.000,00	12	1.132.000.000,00	12	1.132.000.000,00	12	1.132.000.000,00	12	1.132.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah



4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				134.988.900,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	134.988.900,00	12	135.000.000,00	12	135.000.000,00	12	135.000.000,00	12	135.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				94.997.900,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	94.997.900,00	12	95.000.000,00	12	95.000.000,00	12	95.000.000,00	12	95.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.132.000.000,00		1.132.000.000,00		1.132.000.000,00		1.132.000.000,00		1.132.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	1.132.000.000,00	12	1.132.000.000,00	12	1.132.000.000,00	12	1.132.000.000,00	12	1.132.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				148.380.300,00		152.827.900,00		152.827.900,00		152.827.900,00		152.827.900,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	148.380.300,00	12	152.827.900,00	12	152.827.900,00	12	152.827.900,00	12	152.827.900,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				14.999.500,00		14.999.500,00		14.999.500,00		14.999.500,00		14.999.500,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	14.999.500,00	2	14.999.500,00	2	14.999.500,00	2	14.999.500,00	2	14.999.500,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				555.000.000,00		725.000.000,00		725.000.000,00		725.000.000,00		725.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100	555.000.000,00	100	725.000.000,00	100	725.000.000,00	100	725.000.000,00	100	725.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				14.970.000,00		14.970.000,00		14.970.000,00		14.970.000,00		14.970.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	4	14.970.000,00	4	14.970.000,00	4	14.970.000,00	4	14.970.000,00	4	14.970.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.797.394.100,00		7.050.000.000,00		7.050.000.000,00		7.050.000.000,00		7.050.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	700	700	1.748.982.300,00	700	725.000.000,00	700	725.000.000,00	700	725.000.000,00	700	725.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50	0	-	50	150.000.000,00	50	150.000.000,00	50	150.000.000,00	50	150.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	5	48.411.800,00	0	-	0	-	0	-	0	-	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah



	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	2	4.000.000.000,00	2	4.000.000.000,00	2	4.000.000.000,00	2	4.000.000.000,00	2	4.000.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	-	6	1.800.000.000,00	6	1.800.000.000,00	6	1.800.000.000,00	6	1.800.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40		-	40	375.000.000,00	40	375.000.000,00	40	375.000.000,00	40	375.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	2	4.000.000.000,00	2	4.000.000.000,00	2	4.000.000.000,00	2	4.000.000.000,00	2	4.000.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	-	6	1.800.000.000,00	6	1.800.000.000,00	6	1.800.000.000,00	6	1.800.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				-		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket mebel yang Disediakan	40		-	40	375.000.000,00	40	375.000.000,00	40	375.000.000,00	40	375.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				48.411.800,00		-		-		-		-	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	5	48.411.800,00	0	-	0	-	0	-	0	-	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50	0	-	50	150.000.000,00	50	150.000.000,00	50	150.000.000,00	50	150.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.748.982.300,00		725.000.000,00		725.000.000,00		725.000.000,00		725.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	700	700	1.748.982.300,00	700	725.000.000,00	700	725.000.000,00	700	725.000.000,00	700	725.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.093.721.212,00		2.011.250.000,00		2.011.250.000,00		2.011.250.000,00		2.011.250.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	48	1.904.744.200,00	48	1.800.000.000,00	48	1.800.000.000,00	48	1.800.000.000,00	48	1.800.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	-	4	21.250.000,00	4	21.250.000,00	4	21.250.000,00	4	21.250.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	188.977.012,00	12	190.000.000,00	12	190.000.000,00	12	190.000.000,00	12	190.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-		21.250.000,00		21.250.000,00		21.250.000,00		21.250.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	-	4	21.250.000,00	4	21.250.000,00	4	21.250.000,00	4	21.250.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.904.744.200,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah



Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	48	1.904.744.200,00	48	1.800.000.000,00	48	1.800.000.000,00	48	1.800.000.000,00	48	1.800.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				188.977.012,00		190.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	188.977.012,00	12	190.000.000,00	12	190.000.000,00	12	190.000.000,00	12	190.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.031.051.544,00		2.540.025.000,00		2.540.025.000,00		2.540.025.000,00		2.540.025.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	6	809.199.344,00	6	809.200.000,00	6	809.200.000,00	6	809.200.000,00	6	809.200.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	30	454.823.500,00	30	454.825.000,00	30	454.825.000,00	30	454.825.000,00	30	454.825.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	8	476.908.700,00	8	706.000.000,00	8	706.000.000,00	8	706.000.000,00	8	706.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	50	15.000.000,00	50	15.000.000,00	50	15.000.000,00	50	15.000.000,00	50	15.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150	150	95.000.000,00	150	305.000.000,00	150	305.000.000,00	150	305.000.000,00	150	305.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	542	542	180.120.000,00	542	250.000.000,00	542	250.000.000,00	542	250.000.000,00	542	250.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				476.908.700,00		706.000.000,00		706.000.000,00		706.000.000,00		706.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	8	476.908.700,00	8	706.000.000,00	8	706.000.000,00	8	706.000.000,00	8	706.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				454.823.500,00		454.825.000,00		454.825.000,00		454.825.000,00		454.825.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	30	454.823.500,00	30	454.825.000,00	30	454.825.000,00	30	454.825.000,00	30	454.825.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	50	15.000.000,00	50	15.000.000,00	50	15.000.000,00	50	15.000.000,00	50	15.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				809.199.344,00		809.200.000,00		809.200.000,00		809.200.000,00		809.200.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	6	809.199.344,00	6	809.200.000,00	6	809.200.000,00	6	809.200.000,00	6	809.200.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah



4.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				95.000.000,00		305.000.000,00		305.000.000,00		305.000.000,00		305.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150	150	95.000.000,00	150	305.000.000,00	150	305.000.000,00	150	305.000.000,00	150	305.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				180.120.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	542	542	180.120.000,00	542	250.000.000,00	542	250.000.000,00	542	250.000.000,00	542	250.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.079.918.437,00		1.579.918.437,00		1.579.918.437,00		1.579.918.437,00		1.579.918.437,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	24	600.000.000,00	24	1.000.000.000,00	24	1.000.000.000,00	24	1.000.000.000,00	24	1.000.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	24	206.638.437,00	24	306.638.437,00	24	306.638.437,00	24	306.638.437,00	24	306.638.437,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	185.000.000,00	2	185.000.000,00	2	185.000.000,00	2	185.000.000,00	2	185.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4	4	88.280.000,00	4	88.280.000,00	4	88.280.000,00	4	88.280.000,00	4	88.280.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				206.638.437,00		306.638.437,00		306.638.437,00		306.638.437,00		306.638.437,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	24	206.638.437,00	24	306.638.437,00	24	306.638.437,00	24	306.638.437,00	24	306.638.437,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				88.280.000,00		88.280.000,00		88.280.000,00		88.280.000,00		88.280.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4	4	88.280.000,00	4	88.280.000,00	4	88.280.000,00	4	88.280.000,00	4	88.280.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				185.000.000,00		185.000.000,00		185.000.000,00		185.000.000,00		185.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	185.000.000,00	2	185.000.000,00	2	185.000.000,00	2	185.000.000,00	2	185.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				600.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah



Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	24	600.000.000,00	24	1.000.000.000,00	24	1.000.000.000,00	24	1.000.000.000,00	24	1.000.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				1.547.801.400,00		1.798.220.000,00		1.798.220.000,00		1.798.220.000,00		1.798.220.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	12	559.008.600,00	12	643.880.000,00	12	643.880.000,00	12	643.880.000,00	12	643.880.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	0	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	12	838.792.800,00	12	1.004.340.000,00	12	1.004.340.000,00	12	1.004.340.000,00	12	1.004.340.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				838.792.800,00		1.004.340.000,00		1.004.340.000,00		1.004.340.000,00		1.004.340.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	12	838.792.800,00	12	1.004.340.000,00	12	1.004.340.000,00	12	1.004.340.000,00	12	1.004.340.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				559.008.600,00		643.880.000,00		643.880.000,00		643.880.000,00		643.880.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	12	559.008.600,00	12	643.880.000,00	12	643.880.000,00	12	643.880.000,00	12	643.880.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	0	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi				214.104.900,00		440.200.000,00		509.240.000,00		590.088.000,00		590.088.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4	4	71.015.700,00	4	158.400.000,00	4	190.080.000,00	4	228.096.000,00	4	228.096.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3	3	76.715.500,00	3	145.000.000,00	3	155.000.000,00	3	165.000.000,00	3	165.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	2	66.373.700,00	2	136.800.000,00	2	164.160.000,00	2	196.992.000,00	2	196.992.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				71.015.700,00		158.400.000,00		190.080.000,00		228.096.000,00		228.096.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4	4	71.015.700,00	4	158.400.000,00	4	190.080.000,00	4	228.096.000,00	4	228.096.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.0002 - Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				66.373.700,00		136.800.000,00		164.160.000,00		196.992.000,00		196.992.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	2	66.373.700,00	2	136.800.000,00	2	164.160.000,00	2	196.992.000,00	2	196.992.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				76.715.500,00		145.000.000,00		155.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3	3	76.715.500,00	3	145.000.000,00	3	155.000.000,00	3	165.000.000,00	3	165.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				3.266.036.240,00		5.049.959.720,00		6.149.959.720,00		7.249.959.720,00		7.249.959.720,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	12	12	2.949.959.720,00	12	3.949.959.720,00	12	4.949.959.720,00	12	5.949.959.720,00	12	5.949.959.720,00	4.01.8.01.0.00.01.0000
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	12	12	165.650.100,00	12	550.000.000,00	12	600.000.000,00	12	650.000.000,00	12	650.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000
	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	12	150.426.420,00	12	550.000.000,00	12	600.000.000,00	12	650.000.000,00	12	650.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000
4.01.01.2.14.0001 - Fasilitas Keprotokolan				165.650.100,00		550.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000
Terlaksananya Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	12	12	165.650.100,00	12	550.000.000,00	12	600.000.000,00	12	650.000.000,00	12	650.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000
4.01.01.2.14.0002 - Fasilitas Komunikasi Pimpinan				2.949.959.720,00		3.949.959.720,00		4.949.959.720,00		5.949.959.720,00		5.949.959.720,00	4.01.8.01.0.00.01.0000
Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	12	12	2.949.959.720,00	12	3.949.959.720,00	12	4.949.959.720,00	12	5.949.959.720,00	12	5.949.959.720,00	4.01.8.01.0.00.01.0000
4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan				150.426.420,00		550.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000
Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	12	150.426.420,00	12	550.000.000,00	12	600.000.000,00	12	650.000.000,00	12	650.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				33.011.513.100,00		24.637.140.688,00		25.797.641.725,00		27.038.482.214,71		27.038.482.214,71	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Implementasi Kebijakan Hukum dan Kesra	100	100	33.011.513.100,00	100	24.637.140.688,00	100	25.797.641.725,00	100	27.038.482.214,71	100	27.038.482.214,71	4.01.8.01.0.00.01.0000
	Persentase Perangkat Daerah Yang Menyusun LPPD	100	100		100		100		100		100		4.01.8.01.0.00.01.0000
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan				222.300.300,00		323.432.032,00		355.775.235,00		391.352.758,72		391.352.758,72	4.01.8.01.0.00.01.0000
Meningkatnya Kualitas Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2	2	47.189.600,00	2	97.408.630,00	2	107.149.493,00	2	117.864.442,30	2	117.864.442,30	4.01.8.01.0.00.01.0000
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	6	6	65.249.100,00	6	103.192.914,00	6	113.512.205,00	6	124.863.425,94	6	124.863.425,94	4.01.8.01.0.00.01.0000
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5	5	109.861.600,00	5	122.830.488,00	5	135.113.537,00	5	148.624.890,48	5	148.624.890,48	4.01.8.01.0.00.01.0000
4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan				47.189.600,00		97.408.630,00		107.149.493,00		117.864.442,30		117.864.442,30	4.01.8.01.0.00.01.0000
Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2	2	47.189.600,00	2	97.408.630,00	2	107.149.493,00	2	117.864.442,30	2	117.864.442,30	4.01.8.01.0.00.01.0000
4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				109.861.600,00		122.830.488,00		135.113.537,00		148.624.890,48		148.624.890,48	4.01.8.01.0.00.01.0000
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5	5	109.861.600,00	5	122.830.488,00	5	135.113.537,00	5	148.624.890,48	5	148.624.890,48	4.01.8.01.0.00.01.0000
4.01.02.2.01.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah				65.249.100,00		103.192.914,00		113.512.205,00		124.863.425,94		124.863.425,94	4.01.8.01.0.00.01.0000
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	6	6	65.249.100,00	6	103.192.914,00	6	113.512.205,00	6	124.863.425,94	6	124.863.425,94	4.01.8.01.0.00.01.0000
4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				31.405.430.100,00		22.284.260.633,00		23.398.473.665,00		24.568.397.348,16		24.568.397.348,16	4.01.8.01.0.00.01.0000



Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1	1	426.201.300,00	1	469.886.933,00	1	493.381.280,00	1	518.050.343,91	1	518.050.343,91	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1	1	21.287.228.800,00	1	11.128.943.700,00	1	11.685.390.885,00	1	12.269.660.429,25	1	12.269.660.429,25	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	1	9.692.000.000,00	1	10.685.430.000,00	1	11.219.701.500,00	1	11.780.686.575,00	1	11.780.686.575,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02.0001 - Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual				9.692.000.000,00		10.685.430.000,00		11.219.701.500,00		11.780.686.575,00		11.780.686.575,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	1	9.692.000.000,00	1	10.685.430.000,00	1	11.219.701.500,00	1	11.780.686.575,00	1	11.780.686.575,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				21.287.228.800,00		11.128.943.700,00		11.685.390.885,00		12.269.660.429,25		12.269.660.429,25	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1	1	21.287.228.800,00	1	11.128.943.700,00	1	11.685.390.885,00	1	12.269.660.429,25	1	12.269.660.429,25	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				426.201.300,00		469.886.933,00		493.381.280,00		518.050.343,91		518.050.343,91	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1	1	426.201.300,00	1	469.886.933,00	1	493.381.280,00	1	518.050.343,91	1	518.050.343,91	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03 - Fasilitas dan Koordinasi Hukum				1.085.954.700,00		1.890.000.000,00		1.890.000.000,00		1.910.000.000,00		1.910.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	390	390	465.843.100,00	395	750.000.000,00	395	750.000.000,00	410	760.000.000,00	410	760.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah



	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	390	390	101.059.300,00	395	395.000.000,00	395	395.000.000,00	410	400.000.000,00	410	400.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	4	4	519.052.300,00	5	745.000.000,00	5	745.000.000,00	6	750.000.000,00	6	750.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03.0001 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah				465.843.100,00		750.000.000,00		750.000.000,00		760.000.000,00		760.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	390	390	465.843.100,00	395	750.000.000,00	395	750.000.000,00	410	760.000.000,00	410	760.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03.0002 - Fasilitas Bantuan Hukum				519.052.300,00		745.000.000,00		745.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	4	4	519.052.300,00	5	745.000.000,00	5	745.000.000,00	6	750.000.000,00	6	750.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				101.059.300,00		395.000.000,00		395.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	390	390	101.059.300,00	395	395.000.000,00	395	395.000.000,00	410	400.000.000,00	410	400.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.02.2.04 - Fasilitas Kerja Sama Daerah				297.828.000,00		139.448.023,00		153.392.825,00		168.732.107,83		168.732.107,83	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Fasilitas Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1	1	17.764.300,00	1	36.300.000,00	1	39.930.000,00	1	43.923.000,00	1	43.923.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	10	10	280.063.700,00	10	103.148.023,00	10	113.462.825,00	10	124.809.107,83	10	124.809.107,83	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.02.2.04.0001 - Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri				280.063.700,00		103.148.023,00		113.462.825,00		124.809.107,83		124.809.107,83	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	10	10	280.063.700,00	10	103.148.023,00	10	113.462.825,00	10	124.809.107,83	10	124.809.107,83	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				17.764.300,00		36.300.000,00		39.930.000,00		43.923.000,00		43.923.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1	1	17.764.300,00	1	36.300.000,00	1	39.930.000,00	1	43.923.000,00	1	43.923.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				798.572.000,00		1.574.529.920,00		1.687.992.344,00		1.861.390.813,00		1.866.390.813,00	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Implementasi Kebijakan Perekonomian	100	100	798.572.000,00	100	1.574.529.920,00	100	1.687.992.344,00	100	1.861.390.813,00	100	1.866.390.813,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang Sesuai Dengan Ketentuan	100	100		100		100		100		100		4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				224.155.900,00		489.000.000,00		489.000.000,00		510.000.000,00		510.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1	1	46.572.300,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	160.000.000,00	1	160.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	1	30.731.200,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1	1	146.852.400,00	1	199.000.000,00	1	199.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah



	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	0		-	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				146.852.400,00		199.000.000,00		199.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1	1	146.852.400,00	1	199.000.000,00	1	199.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				46.572.300,00		150.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1	1	46.572.300,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	160.000.000,00	1	160.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				30.731.200,00		80.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	1	30.731.200,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				-		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	0		-	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				106.078.700,00		195.000.000,00		197.000.000,00		200.000.000,00		205.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kegiatan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3	3	37.318.400,00	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	0	1	29.999.600,00	1	35.000.000,00	1	37.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3	3	38.760.700,00	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02.0001 - Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan				37.318.400,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3	3	37.318.400,00	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				29.999.600,00		35.000.000,00		37.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	0	1	29.999.600,00	1	35.000.000,00	1	37.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				38.760.700,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3	3	38.760.700,00	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				406.905.000,00		750.529.920,00		861.992.344,00		996.390.813,00		996.390.813,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah



Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150	150	33.617.600,00	160	53.036.300,00	170	65.000.000,00	180	75.000.000,00	180	75.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	112	150	206.940.900,00	150	372.493.620,00	150	446.992.344,00	150	536.390.813,00	150	536.390.813,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	1	166.346.500,00	1	325.000.000,00	1	350.000.000,00	1	385.000.000,00	1	385.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				206.940.900,00		372.493.620,00		446.992.344,00		536.390.813,00		536.390.813,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	112	150	206.940.900,00	150	372.493.620,00	150	446.992.344,00	150	536.390.813,00	150	536.390.813,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				166.346.500,00		325.000.000,00		350.000.000,00		385.000.000,00		385.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	1	166.346.500,00	1	325.000.000,00	1	350.000.000,00	1	385.000.000,00	1	385.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				33.617.600,00		53.036.300,00		65.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150	150	33.617.600,00	160	53.036.300,00	170	65.000.000,00	180	75.000.000,00	180	75.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				61.432.400,00		140.000.000,00		140.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1	1	14.998.400,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1	1	32.094.600,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1	1	14.339.400,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				14.998.400,00		50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1	1	14.998.400,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

4.01.03.2.04.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				14.339.400,00		40.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1	1	14.339.400,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
4.01.03.2.04.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				32.094.600,00		50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1	1	32.094.600,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	4.01.8.01.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sumber: Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab.Mempawah

Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta sub kegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah.

**Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas
dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Mebel	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	

			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	
			Penataan Organisasi	
			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi dan Birokrasi	
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
			Fasilitasi Keprotokolan	
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	
			Penataan Administrasi Pemerintahan	
			Pengelola Administrasi Kewilayahan	
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
			Fasilitasi Kerjasama Daerah	
			Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	
			Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	
			Fasilitasi dan koordinasi hukum	

			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
			Fasilitasi Bantuan Hukum	
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi	
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	

				Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	
				Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	
				Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	
				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	

Sumber:Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab.Mempawah

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat *outcome-oriented* dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	63,5	64	64,5	65	65,5	66	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80	81	82	83	84	85	
3	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	Nilai	11	12	12,5	13	13,5	14	
4	Nilai SAKIP OPD	Nilai	71	71,5	72	72,5	73	73,5	
5	Nilai LPPD Kabupaten Mempawah	Skor	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	
6	Indeks Kepuasan Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Kasekretariat	Persentase (%)	80	81	82	83	84	85	

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	%	91	92	93	94	95	96	
2	Persentase Implementasi Kebijakan Perekonomian	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang Sesuai Dengan Ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun LPPD	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Implementasi Kebijakan Hukum dan Kesra	%	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah berisi perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah ini diharapkan dapat memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antarperangkat daerah, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Mempawah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2045 serta RPJMD Kabupaten Mempawah periode berjalan.
2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara input, output, dan outcome.
3. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.
5. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Kabupaten Mempawah. Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur



mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.



Pemerintah
Kabupaten Mempawah